PT BINANUSA PRACETAK & REKAYASA

Consultant & Construction Engineering

Since 1999

COMPANY PROFILE

FOR A BETTER CONSTRUCTION QUALITY



www.binanusa.co.id

TABLE OF CONTENTS









PENDAHULUAN 01
STRUKTUR ORGANISASI 02
LAYANAN & PRODUK 03

LAMPIRAN – LAMPIRAN
LEGALITAS PERUSAHAAN 13
AKTA PENDIRIAN 14
AKTA PERUBAHAN TERAKHIR 24
SURAT KETERANGAN DOMISILI 28
PERPAJAKAN 29
KEANGGOTAAN ASOSIASI 30
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 31
SERTIFIKAT KOMPETENSI (SKK) 34
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) 46
LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN 51
SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN REKENING 52
KLIEN 53
PENGALAMAN PEKERJAAN 55

PENDAHULUAN

PT Binanusa Pracetak & Rekayasa adalah Perusahaan yang bergerak di bidang Konsultan Konstruksi khususnya di bidang Investigasi, Perencanaan, Pengawasan dan pekerjaan *Retrofitting, Mechanical, Electrical* dan sejenisnya.

Sejalan dengan misi kami yaitu berpartisipasi dalam pembangunan Nasional, PT Binanusa Pracetak & Rekayasa menyediakan layanan kepada pelanggan dengan kualitas terbaik, harga yang kompetitif, dan waktu yang tepat.

PT Binanusa Pracetak & Rekayasa didirikan oleh Ir. Sjafei Amri, Dipl. E. Eng pada tahun 1999, sampai dengan hari ini telah banyak proyek yang kami selesaikan meliputi hampir seluruh wilayah di Indonesia. Kepuasan pelanggan adalah tujuan utama kami dan tentu saja hal ini bisa tercapai dengan komitmen dan dukungan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan berpengalaman di bidangnya, peralatan yang berkualitas dan persediaan yang cukup.

Kami berharap hal ini akan menghasilkan kerja sama yang saling menguntungkan baik dengan Pelanggan yang terdahulu ataupun Pelanggan baru di tahun-tahun berikutnya, dan ke depannya kami mengharapkan dukungan yang tak henti-hentinya.



VISI : Menjadi Konsultan Terkemuka dalam Kualitas Audit Forensik Struktur Bangunan / Rancang Bangun / Produk Barang Teknik dan Pelayanan.

MISI Menyelenggarakan layanan Audit Forensik Struktur Bangunan / Rancang Bangun dan Produk barang teknik yang Efektif, Efisien, Inovatif dan Berkualitas melalui keunggulan Sumber Daya Manusia, Teknologi, Peralatan serta Metoda Kerja yang Profesional.

ORGANIZATIONAL STRUCTURE

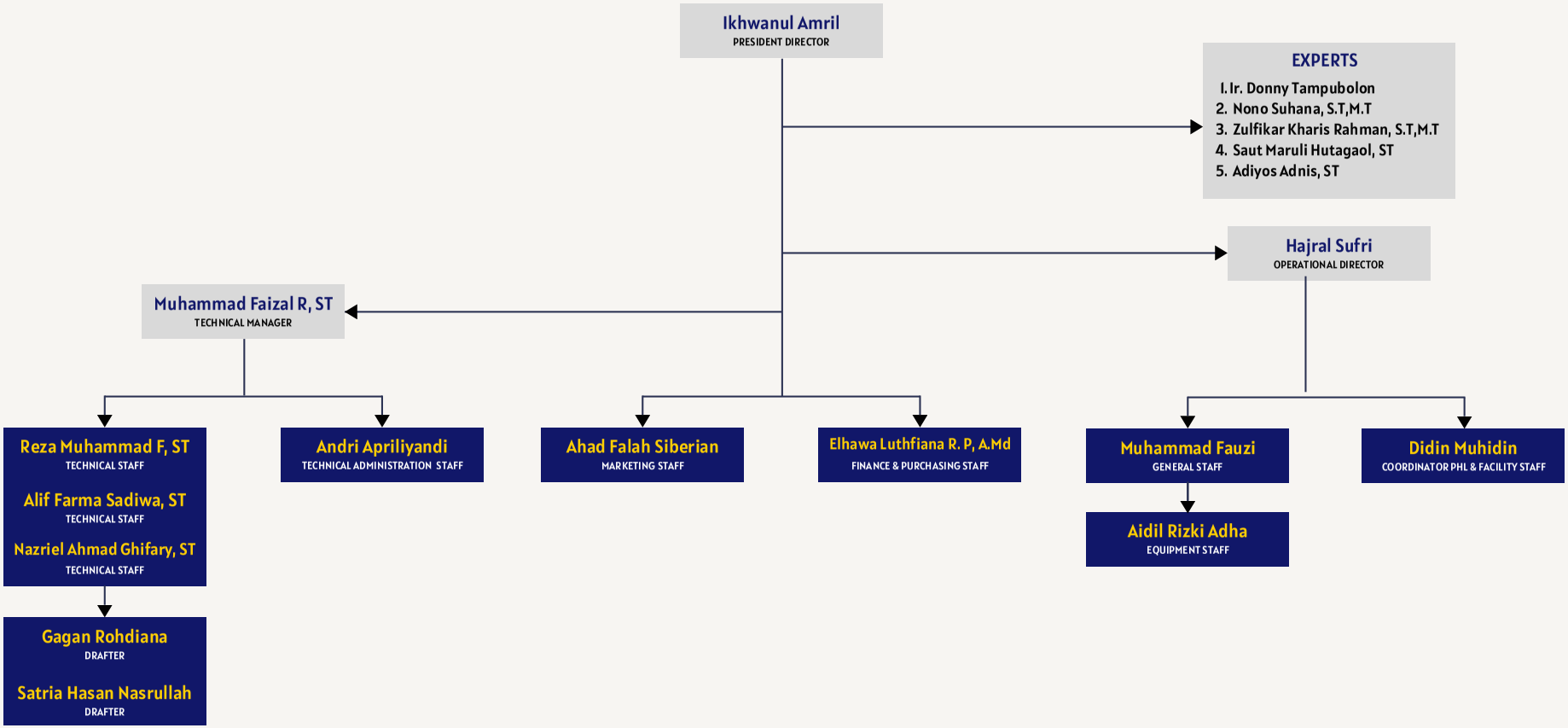

BANDUNG, 17 NOVEMBER 2026

IKHWANUL AMRIL
DIREKTUR UTAMA

LAYANAN & PRODUK
AUDIT STRUKTUR BANGUNAN

Tujuan dari pada dilakukannya layanan audit struktur bangunan adalah agar terhindar dari kerusakan yang lebih besar sehingga keamanan penghuni dan bangunan itu sendiri dapat tetap terjaga. Setiap bangunan tentunya memiliki daya tahan yang berbeda-beda tergantung dari beban yang diterima dan juga material yang digunakannya. Jika bangunan tersebut mulai menimbulkan beberapa gejala yang mengindikasikan adanya kerusakan seperti adanya retakan halus, kondisi struktur terlihat miring dan sebagainya maka harus segera dilakukan audit struktur bangunan.

Audit struktur membantu dalam identifikasi dan pencegahan kerusakan yang mungkin tidak terlihat secara kasat mata. Kerusakan seperti retakan pada dinding atau korosi pada elemen struktural seringkali tidak mudah terdeteksi tanpa pemeriksaan yang mendalam. Dengan melakukan audit secara rutin, pemilik bangunan dapat melakukan perbaikan yang diperlukan sebelum masalah tersebut berkembang menjadi lebih serius dan lebih mahal untuk diperbaiki. Hal ini tidak hanya meningkatkan keamanan, tetapi juga dapat memperpanjang umur bangunan secara keseluruhan.

Selain itu, audit struktur juga berfungsi untuk memastikan bahwa bangunan mematuhi standar dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Setiap bangunan harus memenuhi berbagai persyaratan keselamatan dan kualitas agar dapat beroperasi dengan baik.

Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga keamanan pengguna dan penghuni bangunan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2018 mengenai “Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung” dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 mengenai “Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung”.





AUDIT FORENSIK STRUKUR BANGUNAN MENCAKUP :

- **Pemeriksaan Visual**
- **Inspeksi Non Destructive Test**
- **Inspeksi Destructive Test**
- **Analisis Struktural**
- **Re-Desain Struktur Bangunan**
- **Desain Struktur**

MANFAAT AUDIT STRUKTUR BANGUNAN :

1. Identifikasi Penyimpangan Struktur Secara Tepat

Melakukan Audit Struktur Bangunan merupakan cara terbaik agar indikasi kerusakan pada struktur bangunan bisa teridentifikasi secara keseluruhan. Dengan begitu, bisa langsung dilakukan perbaikan agar tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar lagi.

2. Biaya Operasional Menjadi Lebih Hemat

Dengan melakukan audit secara rutin, pemilik dapat mendeteksi masalah kecil sebelum berkembang menjadi kerusakan besar yang memerlukan perbaikan mahal. Ini memungkinkan perencanaan pemeliharaan yang lebih efisien dan hemat biaya.

3. Meningkatkan Keamanan

Audit struktur berfungsi untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi kerusakan atau kelemahan pada elemen-elemen struktural. Dengan mendeteksi masalah lebih awal, risiko kecelakaan dapat diminimalkan, sehingga meningkatkan keselamatan bagi penghuni dan pengguna bangunan.



Inspeksi Non Destructive Test

Non Destructive Test atau biasa disingkat NDT merupakan suatu teknik pengujian pada material tanpa harus merusak objek yang diujinya. Pengujian ini biasanya lebih banyak dipilih karena potensi kerusakan yang ditimbulkan pada saat proses pengujian sangat minim. Metode NDT umumnya bergantung pada penggunaan radiasi elektromagnetik, suara dan konversi sinyal lainnya untuk memeriksa berbagai macam barang (logam dan non-logam) untuk mendapatkan propertis fisik dari benda yang di uji (kekuatan, kepadatan, konfigurasi dan lain sebagainya).

Pengujian Non Destructive Testing (NDT) dapat diterapkan pada struktur bangunan baru maupun lama. Pada struktur baru, NDT berfokus pada pengendalian kualitas untuk memastikan bahwa bahan dan pelaksanaan konstruksi memenuhi standar yang ditetapkan tanpa merusak integritas material. Sementara itu, untuk struktur lama, NDT sangat penting dalam mengidentifikasi masalah yang muncul setelah bertahun-tahun penggunaan, seperti retakan atau deformasi, serta dampak dari faktor eksternal seperti gempa bumi dan cuaca buruk. Metode ini memungkinkan deteksi cacat internal dan penilaian kondisi struktural tanpa merusak elemen yang ada, sehingga mendukung keselamatan dan keberlanjutan bangunan.

Jenis Pengujian Non Destructive Test :



Rebound Hammer Test

Concrete Hammer Test Atau Rebound Hammer Test merupakan suatu metode uji yang mudah dan praktis untuk mengetahui nilai kekerasan permukaan beton serta dapat dikorelasikan untuk dapat memperkirakan mutu beton permukaan.



Concrete Rebar Scanner

Concrete Rebar Scanner atau sering disebut juga dengan Cover Meter Test merupakan suatu metode uji NDT yang berfungsi untuk mengukur tebal selimut beton, konfigurasi penulangan serta perkiraan diameter tulangan berdasarkan gelombang electromagnetic.



Ultrasonic Pulse Velocity Test

Ultrasonic Pulse Velocity atau UPV Test merupakan metode uji yang berfungsi untuk mengidentifikasi mutu beton, Homogenitas beton, serta dapat juga digunakan untuk memperkirakan kedalaman retak permukaan beton dengan menggunakan rambat gelombang ultrasonic.



Ultrasonic Pulse Echo

Ultrasonic Pulse Echo merupakan pengujian yang berfungsi untuk mengukur dan memperkirakan kedalaman dan ukuran rongga (Void), deliminasi dan cacat lain pada beton



Concrete Resistivity Test

Pengujian Resistivitas Beton berfungsi untuk mengukur resistivitas listrik beton, semakin rendah hambatan listrik maka semakin mudah arus korosi mengalir melalui beton dan semakin besar kemungkinan terjadinya korosi.



Coating Thickness Meter Test

Pengujian ini berfungsi untuk mengukur ketebalan lapisan cat atau pelapis pada permukaan material jenis logam Ferro dan Non-Ferrous. Dengan menggunakan Coating Thickness Gauge, auditor dapat memastikan bahwa ketebalan lapisan cat memenuhi standar yang ditetapkan, yang sangat penting dalam industri seperti otomotif, konstruksi, dan manufaktur.



Ultrasonic Thickness Measurement Test

Ultrasonic Thickness Measurement Test berfungsi untuk mengukur ketebalan material dengan menggunakan gelombang ultrasonic. Pengujian yang dilakukan untuk mengukur ketebalan logam, dan bahan-bahan non-logam misalnya aluminium, titanium, plastik, keramik, kaca dan lain sebagainya.



Torsion Test

Pengujian torsi berfungsi untuk mengukur kekencangan baut yang terpasang. Dengan melakukan pengujian secara berkala, tanda-tanda kelemahan atau keausan pada komponen dapat terdeteksi lebih awal, sehingga tindakan pencegahan dapat diambil sebelum terjadi kegagalan yang berpotensi merugikan.



Magnetic Particle Inspection

Magnetic Particle Inspection berfungsi untuk mendeteksi cacat permukaan las pada material ferromagnetik, seperti besi dan baja. Metode ini menggunakan medan magnet untuk menarik partikel magnetik ke area cacat, seperti retakan atau lubang, yang menyebabkan gangguan pada medan magnet.



Geo Penetrating Radar Test

Alat ini berfungsi untuk mendeteksi dan memetakan objek yang terkubur di bawah permukaan tanah menggunakan gelombang radar. Metode ini dapat mengidentifikasi lapisan tanah, struktur geologi, dan keberadaan utilitas bawah tanah seperti pipa, kabel, dan rongga tanpa merusak material yang ada. GPR bekerja dengan memancarkan gelombang elektromagnetik ke dalam tanah dan menganalisis gelombang yang dipantulkan kembali setelah bertemu dengan objek atau lapisan berbeda di bawah permukaan.

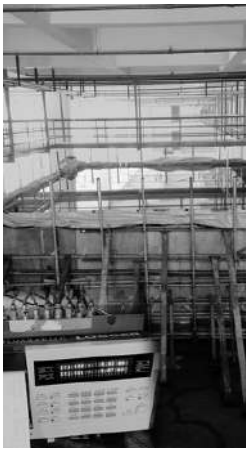

Structural Loading Test

Tujuan uji pembebanan / Loading Test / Structural Loading Test adalah untuk mengetahui apakah bagian struktur (yang diuji) masih kuat menahan beban kerja (working load) yang membebaninya atau tidak.

Pada saat pengujian struktur diamati apakah perilakunya masih memenuhi kriteria peraturan bangunan yang berlaku atau tidak, hasil dari uji ini dapat menjadi salah satu indikasi apakah struktur masih aman atau tidak bagi penggunanya.



Dynamic & Static Test

Pengujian beban yang direkomendasikan oleh AASHTO (2000) dimaksudkan untuk mengevaluasi pengujian beban pada jembatan yang adalah untuk mengevaluasi respon struktural jembatan tanpa menyebabkan kerusakan. Pada saat pengujian, jembatan harus dipastikan dalam keadaan sehat dan layak untuk diuji. Oleh karena itu, sebelum dilaksanakan pengujian perlu untuk dilakukan survey detail pada jembatan.



Inspeksi Destructive Test

Destructive Test, atau pengujian merusak, adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi sifat-sifat material dengan cara menghancurkan atau merusak sampel yang diuji. Metode ini bertujuan untuk memahami karakteristik fisik dan mekanis material, seperti kekuatan, kekerasan, dan keuletan. Berbagai jenis pengujian destruktif, seperti uji tekan, uji tarik, dan uji lentur, dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat mengenai kinerja material di bawah kondisi tertentu. Meskipun hasil dari pengujian ini tidak dapat digunakan kembali, informasi yang diperoleh sangat berharga untuk memastikan bahwa material tersebut telah memenuhi standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan.

Jenis Pengujian Destructive Test :



Adhesion Test (Pull Off Test)

Adhesion Test berfungsi untuk mengukur daya rekat suatu material terhadap permukaan tertentu. Uji ini biasanya dilakukan pada lapisan seperti cat, pelapis, lem, atau perekat lainnya untuk memastikan bahwa lapisan tersebut dapat menempel dengan baik pada substrat di mana material tersebut diaplikasikan. Hasil dari pengujian ini penting untuk menilai kekuatan adhesi dan daya tahan lapisan, yang berdampak pada kualitas dan umur produk.



Core Drill & Compressive Strength Test

Pengujian yang dilakukan untuk mendapatkan sample beton untuk penilaian estimasi kuat tekannya pada struktur suatu bangunan. Pengujian ini juga membantu dalam perencanaan proyek dengan memberikan data yang akurat mengenai kondisi dan sifat material eksisting. Persyaratan pengujian ini berdasarkan SNI 2492-2018.



Steel Tensile Strength Test

Metode yang berfungsi untuk mengukur sifat mekanik dari baja, termasuk kekuatan tarik, kekuatan leleh, dan elongasi. Pengujian ini dilakukan dengan memberikan beban tarik pada sampel baja hingga terjadi kegagalan, yang memungkinkan penilaian terhadap kemampuan material untuk menahan beban tanpa mengalami deformasi permanen.



Leeb Hardness Test

Metode ini berfungsi untuk mengukur kekerasan suatu material, terutama logam serta dapat memperkirakan kekerasan baja dan dapat dikorelasikan untuk dapat mengetahui nilai kuat tarik baja. Metode ini melibatkan penggunaan indentor berbentuk bola yang di bawah beban tertentu, dan ukuran lekukan yang dihasilkan diukur untuk menghitung nilai kekerasan Brinell (HB).



Pull Out Test

Pull Out Test berfungsi mengukur besarnya gaya maksimum yang dibutuhkan untuk mencabut logam/besi yang terpasang di suatu struktur beton, baja atau tanah. Logam ini dapat ditanam sebelum maupun sesudah proses casting.



Carbonation Test

Carbonation Test berfungsi untuk menilai kondisi beton dengan mengukur kedalaman karbonasi, yaitu proses di mana karbon dioksida (CO2) dari atmosfer bereaksi dengan mineral dalam beton dengfan menggunakan larutan Fenolftalein.



Chloride Penetration Test

Chloride Penetration Test berfungsi untuk mengevaluasi kemampuan beton dalam menahan penetrasi ion klorida, yang merupakan faktor penting dalam menentukan daya tahan dan integritas struktur beton. dengan kata lain pengujian ini untuk mengetahui laju kandungan klorida yang terkandung di dalam beton



Half Cell Potentiometer Test

Half Cell Potentiometer Test berfungsi untuk menentukan potensi korosi pada baja tulangan dalam struktur beton bertulang. Hasil dari pengujian ini membantu dalam mengevaluasi kondisi struktural dan daya tahan beton, serta menentukan tindakan perbaikan yang diperlukan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada baja tulangan akibat korosi. Interpretasi hasil biasanya mengikuti pedoman ASTM C876, yang mengkategorikan risiko korosi berdasarkan nilai potensial yang terukur.



Assessment Geoteknik

Assessment Geoteknik adalah evaluasi mendalam terhadap kondisi geoteknik pada proyek konstruksi. Analisis geoteknik adalah disiplin ilmu dalam bidang teknik sipil yang mempelajari perilaku bahan-bahan geologi seperti tanah, batuan, dan mineral dalam konteks proyek konstruksi dan rekayasa sipil

Jenis Pengujian Soil Investigation :

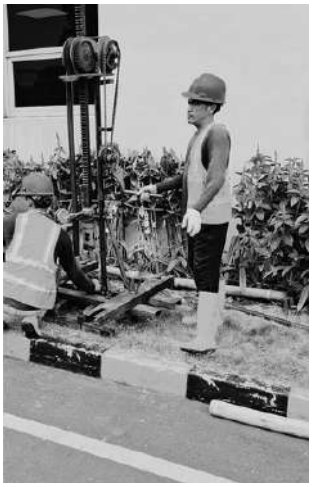

Tujuan utama dari pengujian tanah adalah untuk mendapatkan informasi tentang daya dukung dan karakteristik tanah serta kondisi geologi di lokasi proyek konstruksi. Proses ini penting untuk memastikan bahwa tanah cukup kuat dan stabil untuk mendukung fondasi bangunan. Pengujian tanah dapat dilakukan dengan berbagai metode, termasuk Sondir, Hand Bor, Drilling, SPT, UDS Sampling, DCP, Sand Cone, Test Pit, CBR, dan Vane Shear Test. Kombinasi dari metode-metode ini memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi dan karakteristik tanah, sehingga membantu dalam perencanaan konstruksi yang lebih baik dan aman.

Survei dan Pemetaan

Ini diperlukan sebagai indikasi awal ada atau tidaknya kerusakan, dimana hal-hal yang menunjukkan kemungkinan adanya kerusakan seperti adanya keretakan, lendutan, korosi dan yang lainnya, bisa di identifikasi untuk di lakukan tindakkan selanjutnya.

Jenis Pengujian Survei dan Pemetaan :



Theodolite

Pengukuran yang dilakukan untuk menentukan kemiringan bangunan sesuai keadaan sebenarnya, dengan cara menentukan tinggi tanah terhadap sudut mendatar dan sudut tegak.



Global Positioning System (GPS)

Pengukuran yang dilakukan untuk menentukan titik koordinat suatu lokasi dengan menggunakan satelit dalam mengakuisisi datanya.



Waterpass

Pengukuran yang dilakukan untuk mengukur suatu benda ataupun garis apakah sudah dalam kondisi rata baik secara vertikal maupun horizontal.

Analisis Desain dan Re-desain Struktur Bangunan

Dalam kegiatan pembangunan suatu konstruksi diperlukan beberapa tahapan yang meliputi proses perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan berkala. Bangunan mungkin dapat mengalami kerusakan saat pembangunan, selama penggunaan, maupun akibat bencana (kebakaran, gempa atau bencana lainnya). Sehingga dibutuhkan penanganan yang tepat dengan metode pemeriksaan yang komprehensif untuk menghasilkan solusi yang tepat guna, tepat mutu dan tepat biaya.

Manfaat

Dengan dilakukannya Analisis Struktur dapat diketahui kondisi aktual struktur pada saat ini, serta upaya perbaikan dan perkuatan bila diperlukan guna memenuhi persyaratan standar yang berlaku agar bangunan menjadi optimal baik secara fungsi, estetika dan keamanan.

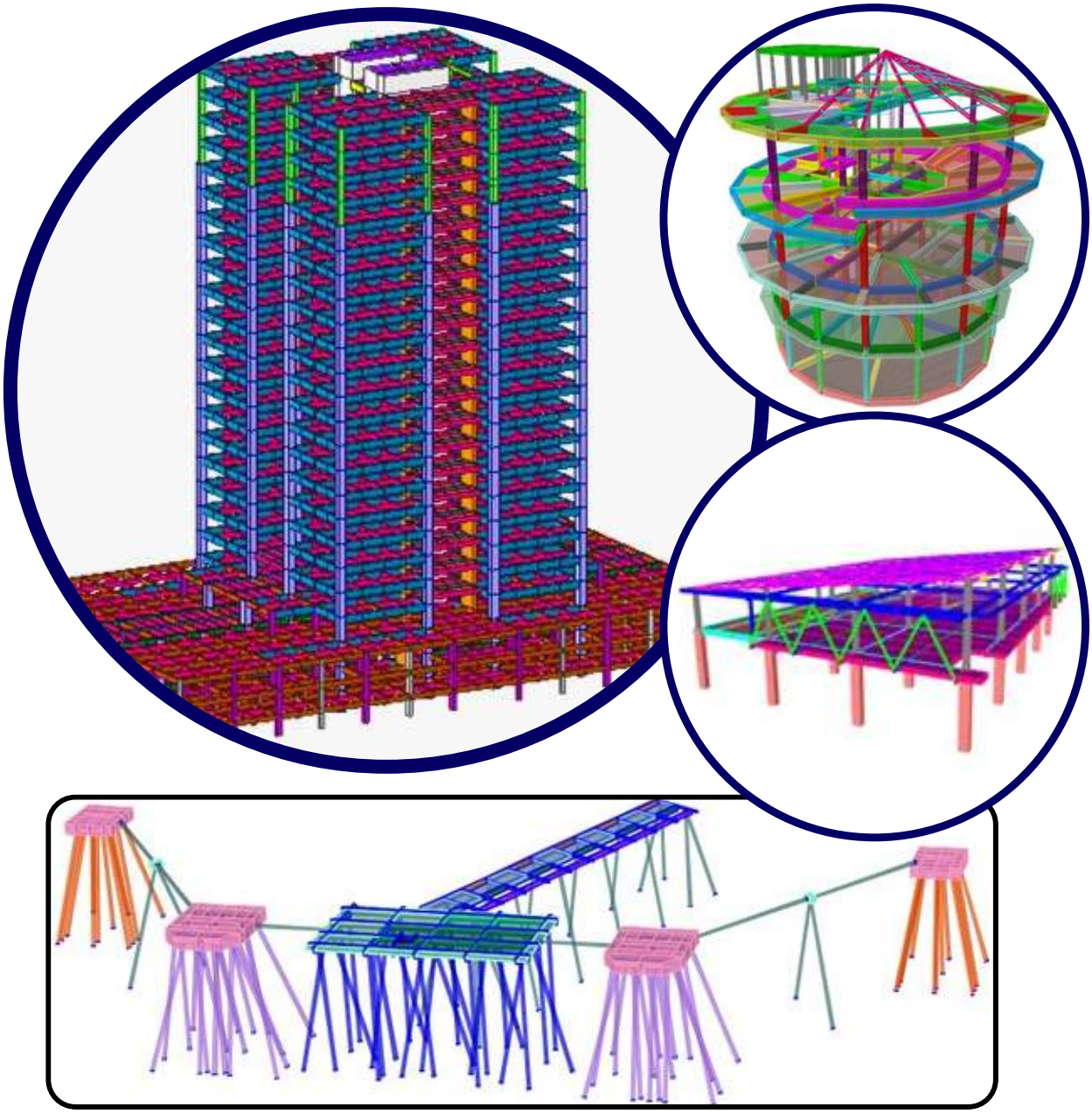

SUPERVISI KONSTRUKSI

Tujuan Supervisi dalam pelaksanaan konstruksi yaitu untuk pengendalian pelaksanaan pekerjaan di lapangan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana mutu, biaya dan waktu serta sasaran kinerja yang telah disepakati. Fungsi dasar Supervisi adalah membentuk sistem pengaman untuk penerapan desain/rencana dan spesifikasi teknik dalam pelaksanaan suatu pekerjaan supaya dapat berjalan sesuai dengan sasaran yang diharapkan dengan resiko yang sekecil mungkin.



Pelaksanaan Supervisi lapangan harus dilakukan secara penuh dengan para tenaga ahli profesional dan berpengalaman. Salah satu perannya adalah menempatkan tenaga-tenaga ahli dilapangan sesuai kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan.

Konsultan Supervisi bertugas secara umum mengawasi pekerjaan konstruksi, dari segi biaya, mutu, dan waktu kegiatan pelaksanaan. Konsultan Supervisi bertanggung jawab secara professional atas jasa Supervisi yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku. Kinerja Supervisi lapangan sangat ditentukan oleh kualitas, integritas, dan intensitas Supervisi yang secara menyeluruh dapat melakukan kegiatannya berdasarkan kerangka acuan kerja (KAK) dan ruang lingkup kerja yang telah disepakati.

PERENCANAAN KONSTRUKSI

Perencanaan konstruksi adalah proses penentuan dan penguraian aktivitas, sumber daya, jadwal, dan tujuan untuk menyelesaikan proyek konstruksi. Ini adalah tahapan ide atau gagasan terkait pembangunan yang dibuat oleh pemilik dan konsultan. Perencanaan yang matang penting untuk efisiensi sumber daya, kualitas konstruksi, pengendalian biaya, menghindari keterlambatan, mengurangi risiko, meminimalkan masalah, dan kesesuaian dengan lingkungan. Tahapan perencanaan proyek konstruksi meliputi : Perencanaan, Studi Kelayakan, Pemaparan, Perancangan, Pengadaan/Pelelangan, Pelaksanaan serta Pemeliharaan dan Persiapan Pemakaian. Selain itu, survei lokasi, analisis tanah, pengurusan perizinan, dan penyusunan desain bangunan termasuk dalam tahapan perencanaan.

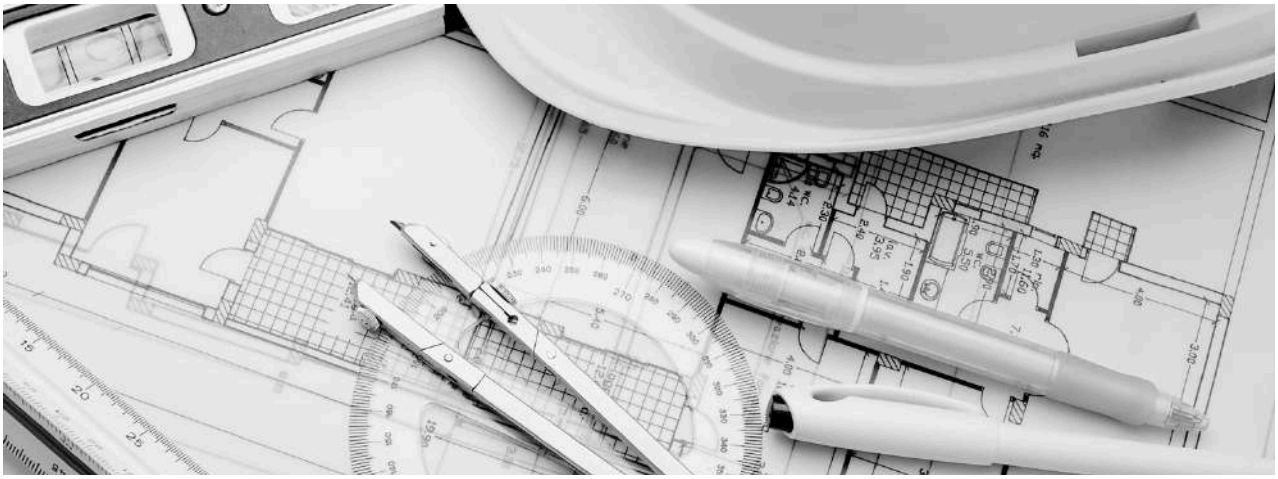

LEGALITAS PERUSAHAAN



ALAMAT KANTOR
Jl. Gegerkalong Hilir No. 175 Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Bandung (40151)

KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN
Nomor : 73/DP/VI/2016

NOMOR INDUK BERUSAHA
Nomor : 0213010150695

KEANGGOTAAN PERSATUAN KONSULTAN INDONESIA (PERKINDO)
Nomor : 0013.32.11.2025

AKTE PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
Notaris : Irene Ratnaningsih Handoko, S. H.
No : 5
Pengesahan : SK. Menkeh RI
No : C-10.HT.03.02-Th.1997

AKTE PERUBAHAN TERAKHIR
Notaris : Risdiyani Tandi, SH.
No : 66
Pengesahan : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
No : AHU-AH.01.09.0247094 Tahun 2024

PERPAJAKAN
SKT : PEM-00356/WPJ.09/KP.0103/2013
SPPKP : S-239PKP/WPJ.09/KP.0103/2021
NPWP : 01.935.934.8-428.000

SERTIFIKAT BADAN USAHA
Jasa Arsitektur Gedung Hunian dan Non Hunian : 021301015069500040002 (AR001)
Jasa Arsitektur Lainnya : 021301015069500010003 (AR002)
Jasa Desain Interior Bangunan Gedung dan Bangunan Sipil : 021301015069500040003 (AR003)
Jasa Rekayasa Konstruksi Gedung Hunian dan Non Hunian : 021301015069500090001 (RK001)
Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi : 202601061308147711070 (RK003)
Jasa Rekayasa Mekanikal Dalam Bangunan : 021301015069500050001 (RK004)
Jasa Pengujian Hasil Pekerjaan Konstruksi dan Fasilitas Laboratorium 202512171006258908590

LAPORAN KEUANGAN 3 TAHUN TERAKHIR
SPPT 2022 : 82348406552231028031
SPPT 2023 : 55348406559241029532
SPPT 2024 : 91348506556251001710

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

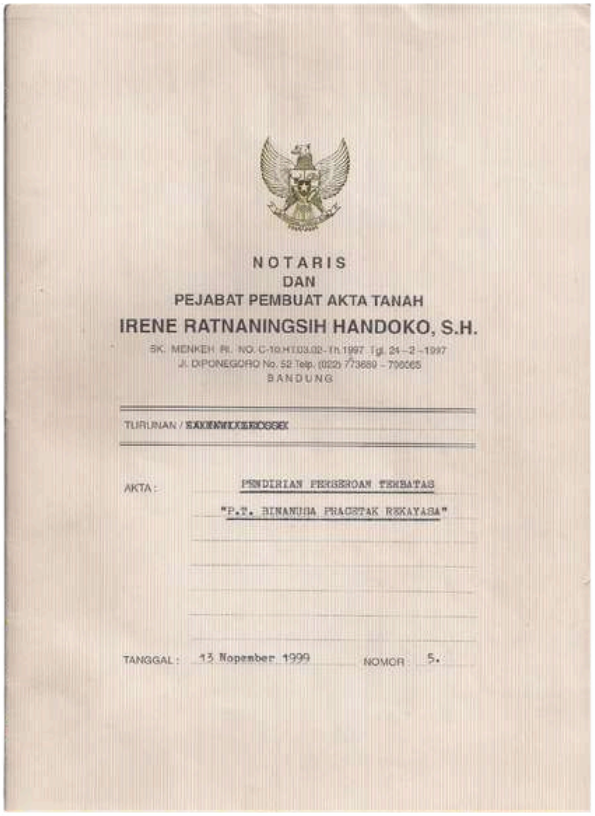

NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
IRENE RATNANINGSIH HANDOKO, S.H.
SK. MENKEH RI. NO.C-10.HT03.02-Th.1997 Tgl. 24-2-1997
Jl. DIPONEGORO No. 52 Telp. (022) 773680 - 790065
BANDUNG

TURUNAN / [redacted]

AKTA : PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
"P.T. BINANUSA PRACETAK REKAYASA"

TANGGAL : 13 Nopember 1999 NOMOR : 5.

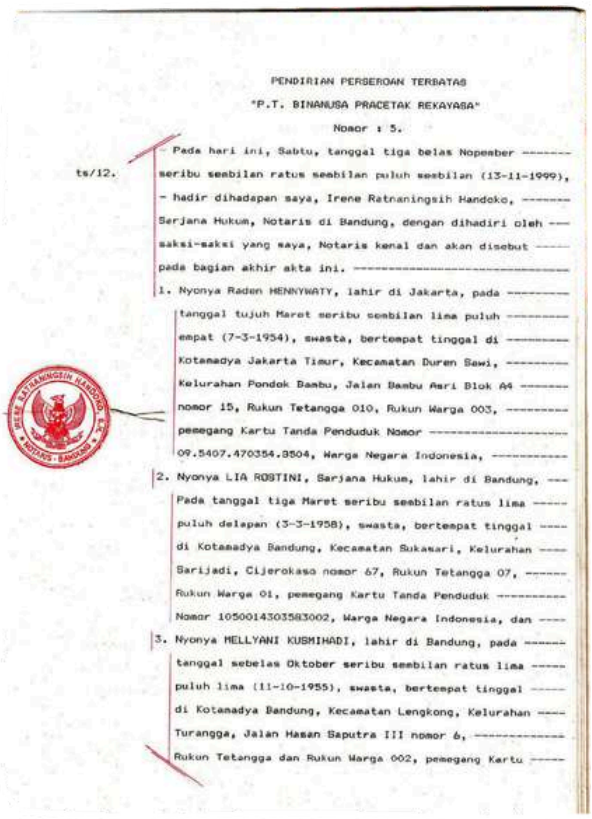

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
"P.T. BINANUSA PRACETAK REKAYASA"
Nomor : 5.

ts/12.

- Pada hari ini, Sabtu, tanggal tiga belas Nopember seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (13-11-1999),
- hadir dihadapan saya, Irene Ratnaningsih Handoko, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini.

1. Nyonya Raden HENNYWATY, lahir di Jakarta, pada tanggal tujuh Maret seribu sembilan lima puluh empat (7-3-1954), swasta, bertempat tinggal di Kotamadya Jakarta Timur, Kecamatan Duren Sawi, Kelurahan Pondok Bambu, Jalan Bambu Ampi Blok A4 nomor 15, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 003, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5407.470354.0504, Warga Negara Indonesia,
2. Nyonya LIA ROSTINI, Sarjana Hukum, lahir di Bandung, Pada tanggal tiga Maret seribu sembilan ratus lima puluh delapan (3-3-1958), swasta, bertempat tinggal di Kotamadya Bandung, Kecamatan Sukasari, Kelurahan Sarijadi, Cijerokasa nomor 67, Rukun Tetangga 07, Rukun Warga 01, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1050014303583002, Warga Negara Indonesia, dan
3. Nyonya MELLYANI KUSMIHADI, lahir di Bandung, pada tanggal sebelas Oktober seribu sembilan ratus lima puluh lima (11-10-1955), swasta, bertempat tinggal di Kotamadya Bandung, Kecamatan Lengkong, Kelurahan Turangga, Jalan Hasan Saputra III nomor 6, Rukun Tetangga dan Rukun Warga 002, pemegang Kartu

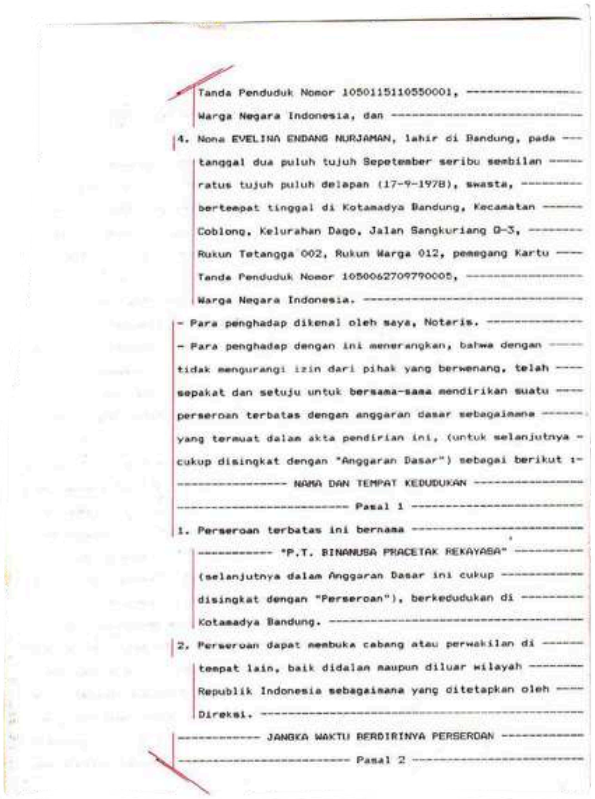

Tanda Penduduk Nomor 1050115110550001,
Warga Negara Indonesia, dan

4. Nona EVELINA ENDANG NURJAMAN, lahir di Bandung, pada tanggal dua puluh tujuh Sepetember seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan (17-9-1978), swasta, bertempat tinggal di Kotamadya Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago, Jalan Sangkuriang D-3, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 012, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1050062709790005, Warga Negara Indonesia.

- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.
- Para penghadap dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut :-

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan terbatas ini bernama "P.T. BINANUSA PRACETAK REKAYASA" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kotamadya Bandung.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

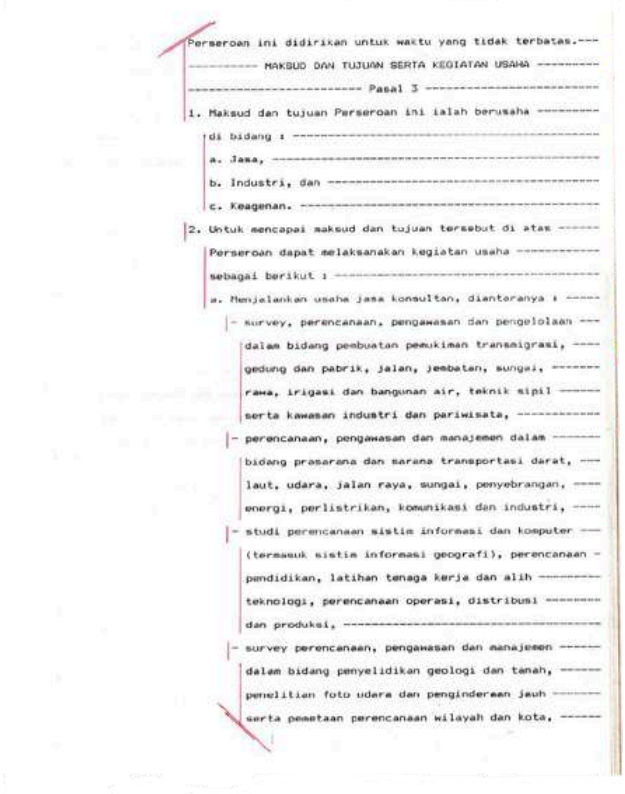

Perseroan ini didirikan untuk waktu yang tidak terbatas.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah berusaha di bidang :
   a. Jasa,
   b. Industri, dan
   c. Keagenan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
   a. Menjalankan usaha jasa konsultan, diantaranya :
      - survey, perencanaan, pengawasan dan pengelolaan dalam bidang pembuatan pemukiman transaigrasi, gedung dan pabrik, jalan, jembatan, sungai, rawa, irigasi dan bangunan air, teknik sipil serta kawasan industri dan pariwisata,
      - perencanaan, pengawasan dan manajemen dalam bidang prasarana dan sarana transportasi darat, laut, udara, jalan raya, sungai, penyebrangan, energi, perlistrikan, komunikasi dan industri,
      - studi perencanaan sistim informasi dan komputer (termasuk sistim informasi geografi), perencanaan pendidikan, latihan tenaga kerja dan alih teknologi, perencanaan operasi, distribusi dan produksi,
      - survey perencanaan, pengawasan dan manajemen dalam bidang penyelidikan geologi dan tanah, penelitian foto udara dan penginderaan jauh serta pemetaan perencanaan wilayah dan kota,

pengembangan teknologi pertanian, kehutanan, ------
lingkungan hidup dan tata ruang wilayah, ----------
- konsultan industri rekayasa bangunan, ----------
- konsultan keagenan produksi industri rekayasa, ----
- konsultan kalibrasi, ----------
- konsultan bidang peningkatan kemampuan sumber -----
daya manusia, ----------
kecuali jasa bidang hukum dan pajak ;----------
b. Menjalankan usaha industri rekayasa bangunan ;--------
c. Menjalankan usaha keagenan produk industri ----------
rekayasa, kecuali agen perjalanan ; dan ----------
d. Menjalankan usaha perdagangan umum, baik barang------
barang produk dalam negeri maupun produk luar negeri.

---------- M O D A L ----------

---------- Pasal 4 ----------

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 300.000.000,-- -----
(tiga ratus juta rupiah), terbagi atas 300 (tiga -------
ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal -----
Rp. 1.000.000,-- (satu juta rupiah). ----------
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh -------
para pendiri, yaitu : ----------
a. penghadap nyonya Raden ---------
Hennywaty, sebanyak 20 (dua ---
puluh) saham atau sebesar ----- Rp. 20.000.000,-- ---
(dua puluh juta rupiah), ------
b. penghadap nyonya Lia Rostini,--
Sarjana Hukum, sebanyak 20 ----
(dua puluh) saham atau ---------
sebesar ---------- Rp. 20.000.000,-- ---
(dua puluh juta rupiah), ------

c. penghadap nyonya Mellyani -----
Kumihadi, sebanyak 20 (dua ----
puluh) saham atau sebesar ----- Rp. 20.000.000,-- ---
(dua puluh juta rupiha), dan --
d. penghadap nona Evelina Endang -
Nurjaman, sebanyak 20 (dua ----
puluh) saham atau sebesar ----- Rp. 20.000.000,-- ---
(dua puluh juta rupiah), ------
jumlah 80 (delapan puluh) --------
saham atau sebesar ---------- Rp. 80.000.000,-- ---
(delapan puluh juta rupiah). ----------
3. 50 % (lima puluh persen) dari nilai nominal setiap -----
saham yang telah ditempatkan tersebut diatas, atau -----
seluruhnya berjumlah Rp. 40.000.000,-- (empat puluh ----
juta rupaih), telah disetor penuh dengan uang tunai ----
kepada Perseroan oleh masing-masing pendiri pada saat --
penanda-tanganan akta pendirian ini, sedangkan sisanya -
yaitu sebanyak 50% (lima puluh persen) dari setiap -----
nilai nominal saham yang telah ditempatkan tersebut ----
atau seluruhnya berjumlah 40.000.000,-- (empat puluh ---
juta rupiah) lagi akan disetor penuh dengan uang -------
kepada Perseroan selambatnya pada tanggal akta ---------
pendirian ini memperoleh pengesahan dari Menteri -------
Kehakiman Republik Indonesia. ----------
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan -
oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, ------
dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. ----------
Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar -
Pemegang saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk -----
mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan ----

itu dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak -----
tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang -
saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah ---
saham yang mereka miliki (proporsional). ----------
Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih -----
ada sisa saham yang belum diambil bagian, maka ---------
Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut ----------
kepada pemegang saham yang masih berminat. ----------
Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) ----
hari terhitung sejak penawaran kepada pemegang saham ---
tersebut masih ada sisa saham yang tidak diambil -------
bagian oleh pemegang saham, Direksi harus menawarkan----
nya kepada karyawan Perseroan yang berminat terlebih ---
dahulu dan bila setelah penawaran pada karyawan ---------
Perseroan itu masih ada sisa saham yang tidak diambil --
bagian, Direksi berhak secara bebas menawarkan sisa ----
saham tersebut kepada pihak lain. ----------

---------- S A H A M ----------

---------- Pasal 5 ----------

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah -----
saham atas nama. ----------
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham ---
hanyalah Warga Negara Indonesia atau badan hukum -------
Indonesia. ----------
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan -------
hukum sebagai pemilik dari satu saham. ----------
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik -------
beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-------
sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara ----
mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama --

dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang ---
berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum -----
atas saham tersebut. ----------
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 di atas belum ----------
dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut --------
tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum --------
Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk -----
saham itu ditangguhkan. ----------
6. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk -------
kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang --
diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham -----
serta peraturan perundang-perundangan yang berlaku. ----
7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham.--

---------- SURAT SAHAM ----------

---------- Pasal 6 ----------

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham. ----------
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap -----
saham diberi sehelai surat saham. ----------
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai ---------
bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang ----------
dimiliki oleh seorang pemegang saham. ----------
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan : -------
a. Nama dan alamat pemegang saham ;----------
b. Nomor surat saham ;----------
c. Tanggal pengeluaran surat saham ;----------
d. Nilai nominal saham .----------
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
a. Nama dan alamat pemegang saham ;----------
b. Nomor surat kolektif saham ;----------
c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham ;----------

d. Nilai nominal saham ;----------
e. Jumlah saham. ----------
6. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda------
tangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama. -------

---------- PENGGANTI SURAT SAHAM ----------

---------- Pasal 7 ----------

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai -----
lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan,---
Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti. -------
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ----------
kemudian dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita -----
acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang -------
Saham berikutnya. ----------
3. Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan -------
mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan --
surat saham pengganti setelah menurut pendapat ---------
Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan -----
jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk ---------
tiap peristiwa yang khusus. ----------
4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, ----
maka asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap ------
Perseroan. ----------
5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham ----
itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.--
6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis-mutandis, juga ----
berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham.

--------- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS ---------

---------- Pasal 8 ----------

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang -----
Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.--
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat : ----------
a. nama dan alamat para pemegang saham ;----------
b. jualah, nomor dan tanggal perolehan surat saham -----
atau surat kolektip saham, yang dimiliki para -------
pemegang saham ;----------
c. jualah yang disetor atas setiap saham ;----------
d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang ----
mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal ----------
perolehan hak gadai tersebut ;----------
e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain -------
selain uang ; dan ----------
f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.-
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai ---------
kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris --------
beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada -------
Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. ------
4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan -
tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan. --
Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala --
panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham ------
adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham -
yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.--
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara ----
Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.-
6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang ---
Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor ----
Perseroan. ----------

---------- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM ----------

---------- Pasal 9 ----------

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta -------
pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang ---------
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil ----
mereka yang sah. ----------
2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 --
atau salinannya disampaikan kepada Perseroan. ---------
3. Pemegang saham yang hendak memindahkan sahamnya harus --
menawarkan terlebih dahulu secara tertulis kepada -----
pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta ----
persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada -------
Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. ---
4. Para pemegang saham lainnya berhak membeli saham -------
yang ditawarkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) -----
hari sejak tanggal penawaran sesuai dengan perimbangan -
jumlah saham yang dimiliki masing-masing. ----------
5. Perseroan wajib menjamin bahwa semua saham yang ---------
ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dibeli ----
dengan harga yang wajar dan dibayar tunai dalam --------
waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penawaran ---
dilakukan. ----------
6. Dalam hal perseroan tidak dapat menjamin terlaksananya -
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5, pemegang --
saham dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada -----
karyawan mendahului penawaran kepada orang lain --------
dengan harga dan persyaratan yang sama. ----------
7. Pemegang saham yang menawarkan sahamnya sebagaimana ----
dimaksud dalam ayat 3 berhak menarik kembali ----------
penawaran tersebut setelah lewatnya jangka waktu -------
yang dimaksud dalam ayat 4. ----------
8. Keharusan menawarkan saham kepada pemegang saham -------
lain hanya dapat dilakukan satu kali. ----------
9. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila --
semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. ---
10. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham ---------
sampai dengan hari rapat itu, pemindahan hak ----------
atas saham tidak diperkenankan. ----------
11. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab ----
lain saham tidak lagi menjadi milik warganegara --------
Indonesia atau badan hukum Indonesia atau apabila ------
seorang pemegang saham kehilangan kewarganegaraan -----
Indonesianya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, --
orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk -------
menjual atau memindahkan hak atas saham itu kepada -----
seorang warganegara Indonesia atau suatu badan hukum ---
Indonesia, menurut ketentuan Anggaran Dasar. ----------
12. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 11 pasal ini -----
belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan --------
dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu --------
dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen -------
atas saham itu ditunda. ----------

---------- D I R E K S I ----------

---------- Pasal 10 ----------

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi -------
yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, ---------
apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka -----
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur ----
Utama. ----------
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah ---
Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan -------
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. ------
3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum ---------

Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu ------
5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapat ---
Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya ----------
sewaktu-waktu. ----------

4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau --------
tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum ---
Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum —
Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris. ----

5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi -------
lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) -------
hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan -----
Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi ---------------
lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ----------
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2. ----------

6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan ---------
anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu -------
30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan --------
tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang -----
Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk --------
sementara Perseroan diurus oleh Komisaris. ----------

7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri -------
dari jabatannya dengan memberitahukan secara ----------
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan --
sekurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal --------
pengunduran dirinya. ----------

8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila : ----------
a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia ;----------
b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7 ;---
c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan --
yang berlaku ;----------

d. meninggal dunia ;----------
e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum ------
Pemegang Saham .----------

---------- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI ----------
---------- Pasal 11 ----------

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan -----
tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai ----
maksud dan tujuannya. ----------

2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan ----
penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan -------
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-

3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di -----
luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala ----
kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan -----
pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala --
tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun -------
kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan --
(tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank) ;—
b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada ---
perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri ;
harus dengan persetujuan Komisaris Utama. ----------

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak -----
atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian ----
besar harta kekayaan Perseroan dalam satu tahun buku ---
baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi -----
yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu -------
sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum -------
Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para -------
Pemegang Saham yang memiliki 3/4 (tiga perempat) -------

bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara -----
yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 ---------
(tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh suara -------
yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. ----------

5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan -----
sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta ---
kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 ---
wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian -
berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan ---
Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung -
sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut. ----------

6. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak -------
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili ----------
Perseroan. ----------
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau ----------
berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana ------
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka ----
salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan ----
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi -----
serta mewakili Perseroan. ----------

7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula ----------
mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau -------
kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang ----
diatur dalam surat kuasa. ----------

8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ----
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan ----------
wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham -------
dapat dilimpahkan kepada Komisaris. ----------

9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang ---------
bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang --------

anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh -----
anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan --------
mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan ---------
kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ----
ini Perseroan diwakili oleh Komisaris. ----------

---------- RAPAT DIREKSI ----------
---------- Pasal 12 ----------

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana -----
dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota --------
Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang -----
atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan ------
tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang -------
bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian ----
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. ---

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota ---------
Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ----------
ketentuan pasal 11 Anggaran Dasar ini. ----------

3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan -------
surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan ------
langsung kepada setiap anggota Direksi dengan ---------
mendapat tanda terima paling lambat 14 (empat belas) ---
hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitung--
kan tanggal panggilan dan tanggal rapat. ----------

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, ---------
tanggal, waktu dan tempat rapat. ----------

5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan ---
atau tempat kegiatan usaha Perseroan. ----------
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, -----
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan ---
dan rapat Direksi dapat diadakan di manapun juga dan ---

berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ------
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam ------
hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan---
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, ---
maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota --
Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi -----
yang hadir. ----------
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat -----
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya ----------
berdasarkan surat kuasa. ----------
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil ----------
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 ----------
(setengah) dari jumlah anggota Direksi hadir atau ------
diwakili dalam rapat. ----------
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan ------
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan ----------
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, ---
maka keputusan diambil dengan pemungutan suara ---------
berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari -----
1/2 (setengah) dari jumlah suara yang dikeluarkan ------
dalam rapat. ----------
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, --
maka ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. ---------
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak ----------
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) ---
suara untuk setiap anggota Direksi lain yang --------
diwakilinya. ----------
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ------
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, ------
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ----

dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat ----------
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.-
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap -------
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ------
ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah ----
suara yang dikeluarkan. ----------
12. - Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah -----
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan ------
semua anggota Direksi telah diberitahu secara ---------
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan ---------
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara --------
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.----
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian ---------
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang ----
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. ----------

---------- K O M I S A R I S ----------
---------- Pasal 13 ----------
1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota ------
Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang ---------
anggota Komisaris, maka seorang diantaranya dapat ------
diangkat sebagai Komisaris Utama. ----------
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanya ----
Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang --
ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.---
3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang ----
Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak ---
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk ---------
memberhentikan sewaktu-waktu. ----------
4. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau ----------
tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat ---------

Umum Pemegang Saham. ----------
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris ----
lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ---
setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan ----
Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu ---
dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. -------
6. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri ----
dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis --
mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya --
30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran -------
dirinya. ----------
7. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila : ---------
a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia ;----------
b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6 ;---
c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan --
yang berlaku ;----------
d. meninggal dunia ;----------
e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum ------
Pemegang Saham. ----------
---------- TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS ----------
---------- Pasal 14 ----------
1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan ----
Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan ---
nasihat kepada Direksi. ----------
2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri ----
setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak ---
memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang ----
dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan -----
berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat -------
bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang ---

kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui -------
segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. ----
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk -------
memberikan penjelasan tentang segala hal yang ---------
ditanyakan oleh Komisaris. ----------
4. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk -----
sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila ---
anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan -------
dengan Anggaran Dasar dan atau Peraturan Perundang------
undangan yang berlaku. ----------
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan -------
kepada yang bersangkutan, disertai alasannya. ---------
6. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari --
sesudah pemberhentian sementara itu, Komisaris -------
diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang --
Saham yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang--
bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau -------
dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan -----
anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu -------
diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. -------
7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh ----
Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, oleh -------
salah seorang anggota Komisaris lainnya dan apabila ----
tidak ada seorangpun anggota Komisaris yang hadir, -----
maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih ----
oleh dan dari antara mereka yang hadir. ----------
Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan --------
kepada pihak lain. ----------
8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak -------
diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari -------

setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhenti-
an sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang
bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan
sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun
anggota Direksi, maka untuk sementara Komisaris
diwajibkan untuk mengurus Perseroan.
Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan
kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih
diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.

10. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka segala
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris
Utama atau anggota Komisaris dalam anggaran
dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT KOMISARIS

Pasal 15

1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana
dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota
Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau
lebih anggota Direksi atau atas permintaan dari 1
(satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh
jumlah saham dengan hak suara yang sah.

2. Panggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris
Utama.

3. Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada setiap
anggota Komisaris secara langsung, maupun dengan
surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang
layak sekurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat
diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal

panggilan dan tanggal rapat.

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara,
tanggal, waktu dan tempat rapat.

5. Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan
atau tempat kegiatan usaha Perseroan.
Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili,
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan
dan Rapat Komisaris dapat diadakan dimanapun juga
dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama,
dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau
berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada
pihak ketiga, maka Rapat Komisaris akan dipimpin
oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota
Komisaris yang hadir.

7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam Rapat
Komisaris hanya oleh seorang anggota Komisaris
lainnya berdasarkan surat kuasa.

8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil
keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari
1/2 (setengah) dari jumlah anggota Komisaris hadir
atau diwakili dalam rapat.

9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan
musyawarah untuk mufakat.
Dalam hal keputusan berdasarkan musyarah untuk
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju
paling sedikit lebih dari 1/2 (setengah) dari jumlah
suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang,

maka Ketua Rapat Komisaris yang akan menentukan.

11. a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)
suara untuk setiap anggota Komisaris lain yang
diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain
dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak
ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah
suara yang dikeluarkan.

12. Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah
tanpa mengadakan Rapat Komisaris dengan ketentuan
semua anggota Komisaris telah diberitahu secara
tertulis dan semua anggota Komisaris memberikan
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian,
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang
diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris.

TAHUN BUKU

Pasal 16

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu)
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu)
Deseember.
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan
ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan

dimulai pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

2. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah
buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan
tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota
Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan.
Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan
di kantor Perseroan paling lambat 14 (empat belas)
hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh
para pemegang saham.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 17

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :
a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana
dimaksud dalam pasal 18 Anggaran Dasar ini.
b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya
dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham
yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran
Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Pasal 18

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan
tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah
tahun buku Perseroan ditutup.

2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :
   a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut untuk mendapat pengesahan rapat.
   b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan rapat.
   c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan.
   d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.

3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan.

4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka pemegang saham berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Pasal 19

1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
2. - Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
   - Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.
3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima, maka pemegang saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.

TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 20

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha.
2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan surat tercatat yang harus dikirim paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal rapat dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
3. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan.
   Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus pula mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 16 ayat 2 telah tersedia di kantor Perseroan.
4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak menjadi syarat dan dalam rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.

PIMPINAN DAN BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 21

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat dipimpin oleh seorang Direksi lainnya, dalam hal anggota Direksi lainnya tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris, dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat.
2. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat berita acara rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat.
   Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.
3. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dalam bentuk akta notaris.

KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN

Pasal 22

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (setengah) bagian dari jumlah

seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1a. tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua.

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1b. harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat.

d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat pertama.

e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/3 (satu pertiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

f. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, Korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang Wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

2. Pemegang Saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.

3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.

4. Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

5. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat.

7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.
Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.

9. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

PENGGUNAAN LABA

Pasal 23

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh rapat tersebut.

2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak menentukan cara penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang dan anggaran dasar Perseroan dibagi sebagai dividen.

3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya, Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.

4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.
Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.
Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan.

PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 24

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.

3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) tersebut, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan.

4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 25

1. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat --------
dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia. --------
2. Pengubahan ketentuan anggaran dasar yang menyangkut ----
pengubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, ----
jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal ------
dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor --
dan pengubahan status Perseroan tertutup menjadi -------
Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat ------
persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia.--
3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut -------
hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup -----
dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik ----------
Indonesia dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) -----
hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang -----
Saham tentang pengubahan tersebut serta didaftarkan ----
dalam Wajib Daftar Perusahaan. ----------
4. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1 ---------
korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling ------
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua ------
puluh satu) hari setelah rapat pertama itu dapat -------
diselenggarakan rapat kedua dengan syarat dan acara ----
yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat ----------
pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan -------
harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum ---
rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal panggilan --
dan tanggal rapat dan keputusan disetujui paling -------
sedikit berdasarkan suara terbanyak dari jumlah --------
suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. ---------
5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus ----------
diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor ----

Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat -------
kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit ----------
dan atau beredar secara luas ditempat kedudukan --------
Perseroan dan dalam Berita Negara paling lambat --------
7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang ---------
pengurangan modal tersebut. ----------

------- PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN -------
---------- Pasal 26 ----------
1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-------
undangan yang berlaku, maka penggabungan, peleburan ----
dan pengambil alihan hanya dapat dilakukan berdasarkan -
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri ------
oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit -------
3/4 (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham ----------
dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui ------
paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah suara ---
yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. ----------
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar ----
harian mengenai rencana penggabungan, peleburan --------
dan pengambilalihan Perseroan paling lambat 14 ---------
(empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum ------
Pemegang Saham. ----------

---------- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI ----------
---------- Pasal 27 ----------
1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-------
undangan yang berlaku, maka pembubaran Perseroan -------
hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat ------
Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang --------
saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per -------
empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ------

yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 ---------
(tiga perempat) dari jumlah suara yang sah yang --------
dikeluarkan dalam rapat. ----------
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya --
jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan ----
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena --------
dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, -----
maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator. ---------
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam -----
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk -------
likuidator. ----------
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat --------
Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan. ---------
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar -------
Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan --------
dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau ------
beredar di tempat kedudukan Perseroan atau tempat ------
kegiatan usaha Perseroan serta memberitahukan kepada ---
Menteri Kehakiman paling lambat 30 (tiga puluh) hari ---
sejak Perseroan dibubarkan. ----------
6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta -------
pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari --------
tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya --------
perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pesegang ---------
Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan --------
sepenuhnya kepada para likuidator. ----------

---------- PERATURAN PENUTUP ----------
---------- Pasal 28 ----------
- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur -------

dalam anggaran dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang --------
Saham yang akan memutuskan. ----------
- Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam ----------
kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan -----
bahwa : ----------
I. - Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 10 dan --------
pasal 13 anggaran dasar ini mengenai tata cara --------
pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah -----
diangkat sebagai : ----------
Direktur Utama ---- : Tuan Antonius Samsu Trihadi, ----
lahir di Kudus, pada tanggal ----
dua belas Pebruari seribu -------
sembilan ratus empat puluh tiga -
(12-2-1943), pegawai swasta, ----
berteempat tinggal di Kotamadya --
Bandung, Kecamatan Lengkong, ----
Kelurahan Turangga, Jalan Hasan -
Saputra 4 nomor 2-B, Rukun ------
Tetangga dan Rukun Warga 002, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
Nomor 10.5011.120243.0002, ------
Warga Negara Indonesia, ---------
Direktur-Direktur - : 1. tuan Insinyur Hobby Parhusip,-
lahir di Sumatra Utara, pada -
tanggal lima Maret seribu ----
sembilan ratus enam puluh ----
delapan (5-3-1968), pegawai --
swasta, berteepat tinggal di -
Kotamadya Bandung, Kecamatan -
Bojongloa Kidul, Kelurahan ----

Situsaeur, Jalan Nyengseret --
nomor 73, Rukun Tetangga 02, -
Rukun Warga 03, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk Nomor ---
1968030504220302057, Warga --
Negara Indonesia, ----------
2. tuan Insinyur Prijasambada, --
lahir di Jakarta, pada -------
tanggal empat belas Oktober --
seribu sembilan ratus enam ---
puluh tiga (14-10-1964), -----
swasta, bertempat tinggal ----
di Kotamadya Jakarta Timur, --
Kecamatan Cakung, Kelurahan --
Jatinegara, Kompleks PLN -----
Klender, Rukun Tetangga 006,--
Rukun Warga 002, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk Nomor ---
09.5403.141063.0124, Warga ---
Negara Indonesia, ----------

Komisaris Utama --- : penghadap nyonya Raden ----------
Hennywaty, ----------

Komisaris-komisaris : 1. penghadap nyonya Lia ---------
Rostini, Sarjana Hukum, ------
2. penghadap nyonya Meliyani ----
Kusmihadi, dan ----------
3. penghadap nona Evelina -------
Endang Nurjaman. ----------

- Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris ----------
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang -------

bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Umum -------
Pemegang Saham yang pertama kali diadakan, setelah ----
akta pendirian ini mendapat pengesahan dari Menteri ---
Kehakiman Republik Indonesia. ----------

II. Tuan Insinyur Hari Nugraha Nurjaman tersebut dan -------
nyonya Tien Somantri, pegawai kantor notaris, ---------
bertempat tinggal di Bandung, Kompleks Griya ----------
Bandung Asri 1 Blok E nomor 89, Bojongsoang, baik -----
bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak ---------
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain -----
dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran -----
Dasar ini dari Instansi yang berwenang dan untuk -------
membuat pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk -----
yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk ----------
memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan ---
dan menandatangani semua permohonan dan dokuaen -------
lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk -----
melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. ---

---------- DEMIKIANLAH AKTA INI ----------

- Dibuat dan diresmikan di Bandung, pada hari dan ----------
tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini -------
dengan dihadiri oleh : ----------
1. Nyonya Dedah Raodah Sukarna, dan ----------
2. Nyonya Ai Karwati, ----------
keduanya pegawai kantor notaris dan bertempat tinggal -----
berturut-turut di Bandung, Jalan Kembar Selatan nomor 3, --
dan Jalan Pagarsih, Gang Madrasah Rukun Tetangga 07, -------
Rukun Warga 01, sebagai saksi-saksi. ----------
- Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris ---
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditanda -------

tangankan akta ini oleh para penghadap tersebut, saksi ---
saksi dan saya, Notaris. ----------
- Dilangsungkan dengan tujuh coretan dan empat gantian ----
tanpa tambahan. ----------
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.----
Diberikan sebagai turunan. ----------

DEPARTEMEN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-1413.HT.01.01.TH. 2000
MENTERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat Permohonan tanggal 02 April 2000 Nomor 12/1301/PT/IV/2000 dari Notaris Irene Ratnaningsih Handoko, SH yang kemudian tanggal 27 April 2000.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pernyataan Notaris, Akta Pendirian Perseroan yang disampaikan telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak ada seberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Perseroan yang dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lemberan Negara Nomor 3587);
2. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.08.01 Tahun 1996 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas :

PT. BINANUSA PRATAMA TAMA
NPWP : 4.930.934.0-424

berkedudukan di Kotamadya Bandung, sesuai dengan Data Akta Pendirian Perseroan tanggal 02 April 2000 yang dibuat oleh Notaris Irene Ratnaningsih Handoko, SH berkedudukan di Bandung.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2000

A.n. MENTERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

ttd.

NIP. 130350117.

AKTA PERUBAHAN TERAKHIR



NOTARIS
dan
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

RISDIYANI TANDI, SH.

SK. TGL. 18 MARET 2002 No. C-261.HT.03.01 - Th.2002
SK. TGL. 18 DESEMBER 2006 No. 313-XVII Th. 2006

KANTOR : JALAN Dr. RAJIMAN NO. 2 - BANDUNG
TELP. 4234790 - 4209797 WA. 08 111 111 2678

[illegible] : SALINAN [illegible]

AKTA : RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PERSEROAN TERBATAS PT. BINANUSA PRACETAK DAN REKAYASA

TANGGAL : 23 AGUSTUS 2024 NOMOR : [illegible]

DIBERIKAN UNTUK :



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PERSEROAN TERBATAS PT. BINANUSA PRACETAK DAN REKAYASA
Nomor : 81.-

Pada hari ini, Jum'at, tanggal 23-08-2024 (dua puluh tiga Agustus tahun duaribu duapuluh empat), pukul 13.00 WIB (tigabelas Waktu Indonesia Barat).

Saya, **RISDIYANI TANDI**, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir dari akta ini :

Atas permintaan dari Direksi Perseroan Terbatas yang akan disebutkan dibawah ini telah berada di kantor saya, Notaris, Jalan Dokter Rajiman nomor 2, Bandung.

Untuk membuat suatu Berita Acara dari apa yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas **PT. BINANUSA PRACETAK DAN REKAYASA**, berkedudukan di Kota Bandung, yang didirikan dengan akta tertanggal 13-11-1999 (tigabelas November seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan) nomor 5, yang dibuat dihadapan TRENG RATNANINGDIH HANDOKO, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung, yang kemudian dirubah dengan akta tertanggal 23-08-2004 (duapuluh tiga Agustus tahun duaribu empat) nomor 6, yang



dibuat oleh MANNY WIARNI WARMANA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia demikian berdasarkan Surat Keputusannya tertanggal 27-01-2005 (dua puluh tujuh Januari tahun duaribu lima) nomor C-02278 HT.01.04.TH 2005, yang kemudian Anggaran Dasarnya telah mengalami beberapa kali perubahan antara lain sebagai berikut :

a. Akta tertanggal 22-01-2010 (duapuluh dua Januari tahun duaribu sepuluh) nomor 2, yang Perubahan Anggaran Dasarnya telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia demikian berdasarkan Surat Keputusannya tertanggal 30-09-2011 (tigapuluh September tahun dua ribu sebelas) nomor AHU-47712.AH.01.02.Tahun 2011 ;

b. Akta tertanggal 10-06-2014 (sepuluh Juni tahun duaribu empatbelas) nomor 2, yang Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia demikian berdasarkan suratnya tanggal 24-06-2014 (duapuluh empat Juni tahun dua ribu empatbelas) nomor AHU-15553.40.22.2014 ;

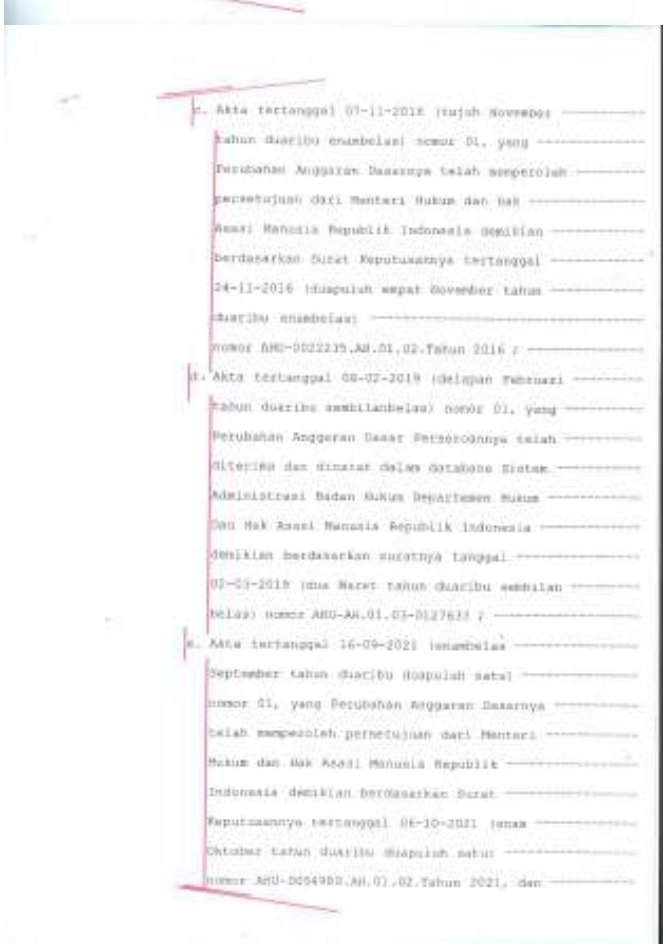

c. Akta tertanggal 07-11-2016 (tujuh November tahun duaribu enambelas) nomor 01, yang Perubahan Anggaran Dasarnya telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia demikian berdasarkan Surat Keputusannya tertanggal 24-11-2016 (duapuluh empat November tahun duaribu enambelas) nomor AHU-0022235.AH.01.02.Tahun 2016 ;

d. Akta tertanggal 08-02-2019 (delapan Februari tahun duaribu sembilanbelas) nomor 01, yang Perubahan Anggaran Dasar Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia demikian berdasarkan suratnya tanggal 02-03-2019 (dua Maret tahun duaribu sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0127633 ;

e. Akta tertanggal 16-09-2021 (enambelas September tahun duaribu duapuluh satu) nomor 01, yang Perubahan Anggaran Dasarnya telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia demikian berdasarkan Surat Keputusannya tertanggal 06-10-2021 (enam Oktober tahun duaribu duapuluh satu) nomor AHU-0054980.AH.01.02.Tahun 2021, dan

Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia demikian berdasarkan suratnya masing-masing berturut-turut tertanggal 06-10-2021 (enam Oktober tahun duaribu duapuluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0457496 ;

2. Akta tertanggal 12-11-2021 (duabelas November tahun duaribu duapuluh satu) nomor 02, yang Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia demikian berdasarkan suratnya tanggal 15-11-2021 (limabelas November tahun duaribu duapuluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0475244 ;

Yang kesemuanya telah dibuat dihadapan NANNY WIANNI WAMBANA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung.

g. Adapun perubahan Anggaran Dasar dan susunan pemegang saham dan susunan pengurusnya yang terakhir adalah sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 14-09-2023 (empatbelas September tahun duaribu duapuluh tiga) nomor 46, yang dibuat oleh saya, Notaris, yang Perubahan Anggaran Dasarnya telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia demikian berdasarkan Surat Keputusannya tertanggal 20-09-2023 (duapuluh September tahun duaribu duapuluh tiga) nomor AHU-0056878.AH.01.02.Tahun 2023, dan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia demikian berdasarkan suratnya tanggal 20-09-2023 (duapuluh September tahun dua ribu duapuluh satu) nomor AHU-AH.01.09-0165236, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 22-09-2023 (duapuluh dua September tahun duaribu duapuluh tiga) nomor 076, Tambahan Berita Negara nomor 029302 Tahun 2023 (duaribu duapuluh tiga) ;

(selanjutnya disebut Perseroan).

Pada Rapat telah hadir dan oleh karena itu telah menghadap kepada saya, Notaris, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang disebutkan dibawah ini :

1. Tuan **PANDU YUDHA RESUMA**, lahir di Padang, pada tanggal 23-09-1985 (duapuluh tiga September seribu sembilanratus delapanpuluh lima), status pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, Kampung Cibadak, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat, dengan Nomor Induk Kependudukan 3273012309850002, Warga Negara Indonesia, sekarang sedang berada di Kota Bandung ;

- Menurut Keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai :

a. Direktur Utama perseroan ;

b. pemegang dan pemilik 100 (seratus) saham dalam perseroan dan berhak untuk mengeluarkan 100 (seratus) suara.

2. Tuan **IRSHADIL AKBIL**, lahir di Bandung, pada tanggal 17-07-1986 (tujuh belas Juli seribu sembilanratus delapanpuluh enam), status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Cijerokaso nomor 67, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 001, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat, dengan Nomor Induk Kependudukan 3273011707860002, Warga Negara Indonesia ;

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai :

a. Direktur perseroan ;

b. pemegang dan pemilik 510 (limaratus sepuluh) saham dalam perseroan dan berhak untuk mengeluarkan 510 (lima ratus sepuluh) suara.

3. Tuan **RAJBAL SUPRI**, lahir di Langsa, pada tanggal 02-10-1979 (dua Oktober seribu sembilanratus tujuhpuluh sembilan), status pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Cimahi, Jalan Karya Bakti, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 016, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat, dengan Nomor Induk Kependudukan 1271060210790006, Warga Negara Indonesia, sekarang sedang berada di Kota Bandung ;

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai :

a. Direktur perseroan ;

b. pemegang dan pemilik 100 (seratus) saham dalam perseroan dan berhak untuk mengeluarkan 100 (seratus) suara.

4. Nyonya **CHITTA AMILIA ISMIPUTRI**, lahir di Bandung, pada tanggal 08-04-1988 (delapan April seribu sembilanratus delapanpuluh delapan), status pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan

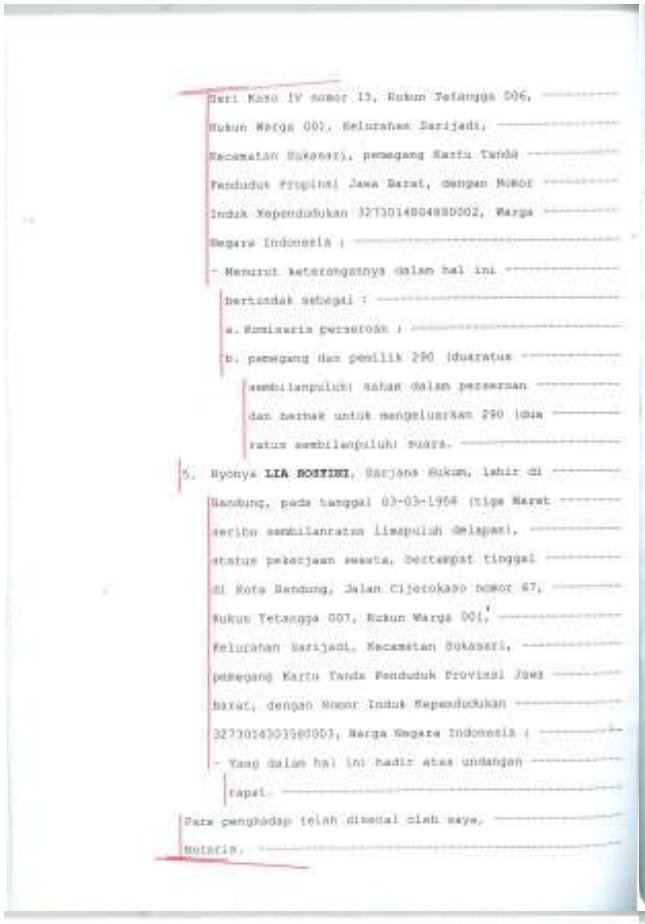

Dari Kaso IV nomor 13, Rukun Tetangga 006,
Rukun Warga 001, Kelurahan Sarijadi,
Kecamatan Sukasari, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Propinsi Jawa Barat, dengan Nomor
Induk Kependudukan 3273014804880002, Warga
Negara Indonesia ;
- Menurut keterangannya dalam hal ini
bertindak sebagai :
a. Komisaris perseroan ;
b. pemegang dan pemilik 290 (duaratus
sembilanpuluh) saham dalam perseroan
dan berhak untuk mengeluarkan 290 (dua
ratus sembilanpuluh) suara.

5. Nyonya **LIA BOSTINI**, Sarjana Hukum, lahir di
Bandung, pada tanggal 03-03-1968 (tiga Maret
seribu sembilanratus limapuluh delapan),
status pekerjaan swasta, bertempat tinggal
di Kota Bandung, Jalan Cijerokaso nomor 67,
Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 001,
Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa
Barat, dengan Nomor Induk Kependudukan
3273014803680003, Warga Negara Indonesia ;
- Yang dalam hal ini hadir atas undangan
rapat.

Para penghadap telah dikenal oleh saya,
Notaris.

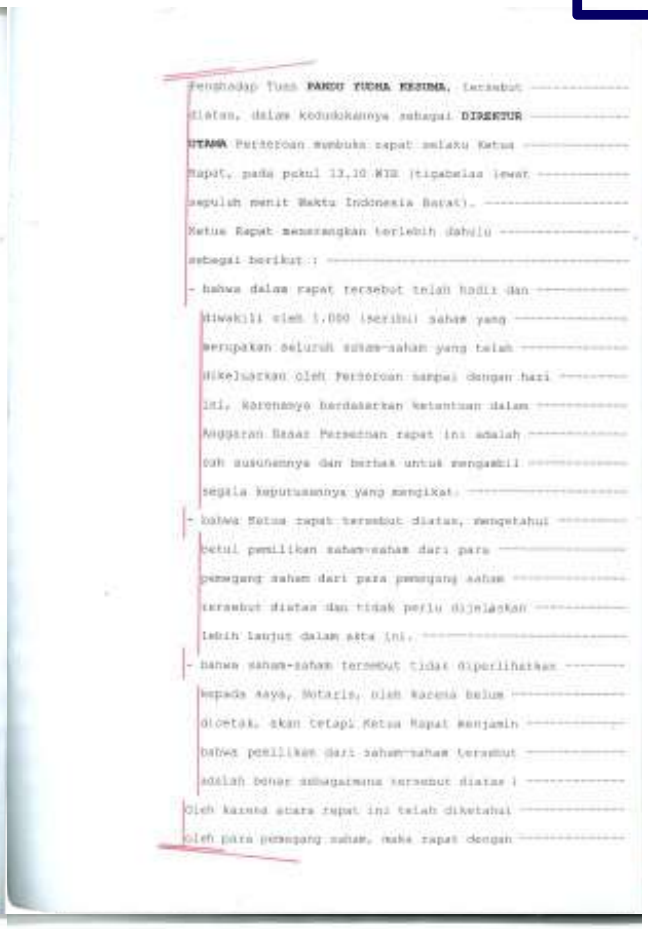

Penghadap Tuan **PANDU YUDHA KESUMA**, tersebut
diatas, dalam kedudukannya sebagai **DIREKTUR
UTAMA** Perseroan membuka rapat selaku Ketua
Rapat, pada pukul 13.10 WIB (tigabelas lewat
sepuluh menit Waktu Indonesia Barat).
Ketua Rapat menerangkan terlebih dahulu
sebagai berikut :
- bahwa dalam rapat tersebut telah hadir dan
diwakili oleh 1.000 (seribu) saham yang
merupakan seluruh saham-saham yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari
ini, karenanya berdasarkan ketentuan dalam
Anggaran Dasar Perseroan rapat ini adalah
sah susunannya dan berhak untuk mengambil
segala keputusannya yang mengikat.
- bahwa Ketua rapat tersebut diatas, mengetahui
betul pemilikan saham-saham dari para
pemegang saham dari para pemegang saham
tersebut diatas dan tidak perlu dijelaskan
lebih lanjut dalam akta ini.
- bahwa saham-saham tersebut tidak diperlihatkan
kepada saya, Notaris, oleh karena belum
dicetak, akan tetapi Ketua Rapat menjamin
bahwa pemilikan dari saham-saham tersebut
adalah benar sebagaimana tersebut diatas ;

Oleh karena acara rapat ini telah diketahui
oleh para pemegang saham, maka rapat dengan



ini memutuskan untuk :

I. Menyetujui maksud penjualan saham milik
penghadap Tuan **PANDU YUDHA KESUMA** sebanyak
100 (seratus) saham dengan nilai nominal
atau sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus
juta Rupiah) kepada penghadap Nyonya **LIA
BOSTINI**, Sarjana Hukum tersebut diatas.

II. Penjualan atas saham-saham tersebut akan
dilakukan dengan akta-akta tersendiri
dan setelah dilakukan penjualan atas
saham-saham tersebut, sehingga dengan
demikian susunan kepemilikan saham Perseroan
Terbatas **PT. BINANUSA PRACETAK DAN REKAYASA**
menjadi sebagai berikut :
- penghadap Tuan **IRNHANUL AMRIL**, sejumlah
510 (limaratus sepuluh) saham dengan nilai
nominal atau sebesar Rp. 510.000.000,00
(limaratus sepuluh juta Rupiah) ;
- penghadap Tuan **HAJRAL SUFRI**, sejumlah 100
(seratus) saham dengan nilai nominal atau
sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta
Rupiah) ;
- penghadap Nyonya **CHITTA AMILIA ILMIFUTRI**,
sejumlah 290 (duaratus sembilanpuluh)
saham dengan nilai nominal atau sebesar
Rp. 290.000.000,00 (duaratus sembilan
puluh juta Rupiah) ;



- penghadap Nyonya **LIA BOSTINI**, Sarjana
Hukum, sejumlah 100 (seratus) saham
dengan nilai nominal atau sebesar
Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) ;
sehingga seluruhnya sebesar 1.000 (seribu)
saham, dengan nilai nominal seluruhnya
sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar
Rupiah).

III. Memberikuasakan dengan hormat atas perkenan
sendiri penghadap Tuan **PANDU YUDHA KESUMA**
tersebut diatas, dari jabatannya selaku
DIREKTUR UTAMA perseroan ;

IV. Memberikan pengesahan, pembebasan serta
pelepasan tanggung jawab sepenuhnya kepada
penghadap Tuan **PANDU YUDHA KESUMA** tersebut
diatas, untuk segala tindakan yang telah
dilakukan olehnya bagi perseroan selama
masa jabatannya yang telah lampau sepanjang
tindakan-tindakan tersebut ternyata dari
pembukuan dan neraca perusahaan
perseroan.

V. Mengangkat para penghadap Tuan **IRNHANUL
AMRIL** dan Nyonya **LIA BOSTINI**, Sarjana
Hukum tersebut diatas, masing-masing
bertindak turut serta selaku **DIREKTUR UTAMA** dan
KOMISARIS UTAMA Perseroan.

VI. Dengan terhitung sejak tanggal hari ini

susunan pengurus perseroan untuk ----------
selanjutnya menjadi sebagai berikut : ----------
DIREKSI ----------
Direktur Utama : penghadap Tuan **IRNANUL** ----------
AMRIL tersebut diatas ; ----------
Direktur : penghadap Tuan **NAJRAL** ----------
SUFRI tersebut diatas ; ----------
DEWAN KOMISARIS ----------
Komisaris Utama : penghadap Nyonya **LIA** ----------
ROSTINI, Sarjana Hukum ----------
tersebut diatas ; ----------
Komisaris : penghadap Nyonya **CHITTA** ----------
AMILIA ILMIPUTRI tersebut ----------
diatas ; ----------

VII. Direksi dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri ----------
dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini ----------
ini kepada pihak lain, dikuasakan untuk ----------
memohon persetujuan atas Anggaran Dasar ----------
ini dari instansi yang berwenang dan untuk ----------
membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam ----------
bentuk yang bagaimanapun juga yang ----------
diperlukan untuk memperoleh persetujuan ----------
tersebut dan untuk mengajukan dan ----------
menandatangani semua permohonan dan dokumen ----------
lainnya, untuk memilih tempat kedudukan ----------

dan untuk melaksanakan tindakan lain yang ----------
mungkin diperlukan. ----------
Oleh karena itu tidak ada hal-hal lain yang ----------
akan dihicarakan, maka Ketua Rapat menutup ----------
rapat ini pada pukul 13.20 WIB (tigabelas lewat ----------
duapuluh menit Waktu Indonesia Barat). ----------
Dari apa yang tersebut diatas, saya, Notaris ----------
membuat Berita Acara ini untuk dipergunakan ----------
sebagaimana mestinya. ----------
---------- **DEMIKIAN AKTA INI** ----------
Dibuat dan diselesaikan di Kota Bandung, pada ----------
jam, hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut ----------
di atas, pada bagian awal akta ini, dengan ----------
dihadiri oleh : ----------
- Nyonya ASTRY DOVIANTY, Sarjana Hukum, Magister ----------
Kenotariatan, lahir di Bandung, pada tanggal ----------
28-11-1982 (duapuluh enam November seribu ----------
sembilanratus delapanpuluh dua), karyawan ----------
notaris, bertempat tinggal di Kabupaten ----------
Bandung, Taman Kopo Indah Belakang Mukn ----------
nomor 47, Kecamatan Margahayu, Desa Sayati, ----------
pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa ----------
Barat, dengan Nomor Induk Kependudukan ----------
3204096611820002, Warga Negara Indonesia, ----------
sekarang sedang berada di Kota Bandung ; ----------
- Nyonya NANI FANYENAR, lahir di Bandung, ----------
pada tanggal 03-04-1977 (tiga April seribu ----------

sembilanratus tujuhpuluh tujuh), karyawan ----------
notaris, bertempat tinggal di Kota Bandung, ----------
Jalan Cikoray Dalam nomor 10, Kecamatan ----------
Lengkong, Kelurahan Lingkar Selatan, ----------
pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa ----------
Barat, dengan Nomor Induk Kependudukan ----------
3273134304770004, Warga Negara Indonesia ; ----------
sebagai saksi-saksi. ----------
Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris ----------
kepada para penghadap dan para saksi, maka ----------
pada ketika itu juga para penghadap, para ----------
saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ----------
ini, dan juga para penghadap membubuhkan cap ----------
ibu jari tangan kanannya pada akta ini. ----------
Dibuat dengan tanpa memaksi coretan, gantian ----------
maupun tambahan. ----------
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ----------
sempurna. ----------
Diberikan sebagai SALINAN. ----------

Notaris di Kota Bandung,

RISDIYANI TANDI, S.H.-

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.09-0247094
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BINANUSA PRACETAK DAN REKAYASA

Kepada Yth.
Notaris RISDIYANI TANDI S.H.
Jl. DR. RAJIMAN NO. 2
KOTA BANDUNG

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang dikimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 81 Tanggal 23 Agustus 2024 yang dibuat oleh Notaris RISDIYANI TANDI S.H., berkedudukan di KOTA BANDUNG, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, Peralihan Saham, Ganti Nama Pemegang Saham, PT BINANUSA PRACETAK DAN REKAYASA, berkedudukan di KOTA BANDUNG, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 02 September 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 02 September 2024
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0185659.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 02 September 2024
Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

KETERANGAN DOMISILI

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

KELURAHAN : **SARIJADI**
KECAMATAN : **SUKASARI**

Model XVI

No. : 029439

SURAT KETERANGAN DOMICILI PERUSAHAAN

Nomor: 30/DP/SRJD/VI/2016

Lurah Sarijadi bersama ini menerangkan bahwa:

Nama	:	Ir.SJAFEI AMRI, Dipl.E.ENG.
No. KTP & TMB	:	3273010904510002, Seumur Hidup
Tempat / Tgl.Lahir	:	Tebing Tinggi Deli, 09 April 1951
Agama	:	Islam
Kewarganegaraan	:	WNI
Alamat Rumah & Telepon	:	Jl. Cijerokaso No. 67, Kel. Sarijadi Kec. Sukasari Kota Bandung Prov. Jawa Barat
		081394906444
Jabatan	:	Direktur

Benar mempunyai perusahaan yang berdomisili dalam wilayah Kelurahan Sarijadi Kecamatan Sukasari Kota Bandung dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Perusahaan	:	PT. BINANUSA PRACETAK DAN REKAYASA
Alamat Kantor	:	Jl. Gegerkalong Hilir No. 175 RT 001 RW 001
Telepon Kantor	:	0222003252
Akte Pendirian	:	NANNY WIARNI WARMANA, SH.
		6 Tanggal 23 Agustus 2004
Bergerak di bidang	:	Konsultan
Jumlah Pegawai	:	8 Orang
Jam Kerja	:	09.00 s/d 17.00 WIB

Surat Keterangan ini dikeluarkan kepada yang bersangkutan untuk 1 (satu) Kali keperluan pengurusan Izin Tempat Usaha. Wajib diperbaharui apabila sudah terdapat hal yang tidak sesuai dengan surat ini.

Surat Keterangan Ini tidak berlaku Apabila terjadi pelanggaran Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Daerah Kota Bandung dan atau kekeliruan/kesalahan dalam pembuatannya.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Registrasi:
Tanggal : 16 Juni 2016
Nomor : 73 / DP / VI / 2016

Mengetahui,
CAMAT SUKASARI

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN SUKASARI

Drs. Avi Sutarsa
NIP. 19671107 1990101 1 001

Bandung, 16 Juni 2016
LURAH SARIJADI

KELURAHAN SARIJADI

MUSLIH
NIP. 19600101 198603 1 037

PERPAJAKAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I
KPP PRATAMA BANDUNG BOJONAGARA
JALAN TERS. PROF. DR. SUTAMI NO. 2, BANDUNG
TELEPON 022-2006520,2004380 FAKSIMILE 022-2009450 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
Nomor:S-239PKP/WPJ.09/KP.0103/2021

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. BINANUSA PRACETAK REKAYASA
2. NPWP : 01.935.934.8-428.000

telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 10 April 2013 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang perpajakan.

Bandung, 8 September 2021
a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,

Ade Meccanova



KEANGGOTAAN ASOSIASI



KARTU TANDA ANGGOTA
PERSATUAN KONSULTAN INDONESIA

PERKINDO

Nama Perusahaan *Company Name* : BINANUSA PRACETAK DAN REKAYASA , PT

No Seri : 0003546.2025 *Serial Number*

Nama Penanggung Jawab *Authorized Name* : IKHWANUL AMRIL

Alamat Badan Usaha *Company Adress* : JL. GEGERKALONG HILIR NO. 175, DESA/KELURAHAN SARIJADI KEC.SUKASARI, KOTA BANDUNG - 40151

Telepon *Phone* : 0222003252

Email *Email* : corporate@binanusa.co.id

Nomor Keanggotaan / *Membership Number*
0013.32.11.2025

STATUS KEANGGOTAAN

PENUH

Berlaku mulai 05 November 2025 s/d 05 November 2026

Jakarta, 06 November 2025

DEWAN PENGURUS DAERAH (DPD)
PROVINSI JAWA BARAT

ARA BUDIDARMA RACHMAT, S.E.
KETUA

DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN KONSULTAN INDONESIA

Ir. Nunus Nugroho A.P, M.M.IPU., ASEAN Eng.
KETUA UMUM

NOMOR INDUK BERUSAHA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0213010150695

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT BINANUSA PRACETAK DAN REKAYASA
2. Alamat Kantor	: JL. GEGERKALONG HILIR NO. 175, Desa/Kelurahan Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 40151
No. Telepon	: 0222003252
Email	: corporate@binanusa.co.id
3. Status Penanaman Modal	: PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Kecil

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus untuk KBLI dengan klasifikasi risiko rendah sebagaimana terlampir, NIB merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 9 November 2020
Perubahan ke-4, tanggal: 2 Februari 2023

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 20 Desember 2023

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0213010150695

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Risiko Rendah Perizinan Tunggal

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		Jenis Produksi	Nomor SNI dan/atau SH*
					Jenis	Legalitas		
1	46900 (Pendukung)	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	Jl. Gegerkalong Hilir No. 175, Desa/Kelurahan Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40151	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha	46900	Sertifikasi jaminan produk halal difasilitasi BPJPH

* SNI: Standar Nasional Indonesia, SH: Sertifikat Halal

B. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Selain Perizinan Tunggal

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	74120 (Pendukung)	Aktivitas Desain Interior	Jl. Gegerkalong Hilir No. 175, Desa/Kelurahan Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40151 Usaha Mikro berjalan sejak: November 1999	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	- Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
2	43120 (Pendukung)	Penyiapan Lahan	Jl. Gegerkalong Hilir No. 175, Desa/Kelurahan Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40151 Usaha Mikro berjalan sejak: November 1999	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	- Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
3	71102	Aktivitas Keinsinyuran	Jl. Gegerkalong Hilir 175 Kelurahan: Sarijadi	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

		dan Konsultasi Teknis YBDI	Kecamatan: Sukasari Kab/Kota: Kota Bandung Provinsi: Jawa Barat, Desa/Kelurahan Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40151		Sertifikat Standar	Telah Terverifikasi	-
4	71101	Aktivitas Arsitektur	Jl. Gegerkalong Hilir 175 , Desa/Kelurahan Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40151	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	- Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
5	71202 (Pendukung)	Jasa Pengujian Laboratorium	Jl. Gegerkalong Hilir No. 175, Desa/Kelurahan Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40151 Usaha Mikro berjalan sejak: Januari 2020	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	- Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

SERTIFIKAT KOMPETENSI
DAFTAR PEMILIK SERTIFIKAT KEAHLIAN KOMPETENSI

No.	Nama	Kompetensi	Jenjang	Masa Berlaku	Asosiasi
1	Nono Suhana, ST., MT	Ahli Teknik Bangunan Gedung	9	06 Des 2022 - 05 Des 2027	Perkindo
2	Adiyos Adnis, ST	Ahli Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung	9	25 Jan 2023 - 24 Jan 2028	Perkindo
3	Saut Maruli Hutagaol, ST	Ahli Utama Teknik Jembatan	9	20 Des 2023 - 19 Des 2028	Perkindo
4	Wildan Solihin, ST	Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung	7	30 Agu 2022 - 29 Agu 2027	AsteKindo
5	Muhammad Faizal Ramadhan, ST	a. Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung b. Ahli Muda Geoteknik	7	05 Agu 2024 - 04 Agu 2029 21 Nov 2025 - 21 Nov 2030	AsteKindo
6	Reza Muhammad Fadhli, ST	Teknisi Geoteknik	6	24 Sep 2025 - 24 Sep 2030	AsteKindo

F6870976

BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
INDONESIA PROFESSIONAL CERTIFICATION AUTHORITY

SERTIFIKAT KOMPETENSI
CERTIFICATE OF COMPETENCE

Nomor Sertifikat / *Certificate Number*
74321 2142.02 9 00027739 2022

Dengan ini menyatakan bahwa,
This is to certify that,

NONO SUHANA, ST., MT.

No. Reg. F 1993 27739 2022 0037586 SI 01

Telah Kompeten pada bidang:
Is competent in the area of:

Jasa Konstruksi
Construction Services

Dengan Kualifikasi / Kompetensi:
With Qualification / Competency:

Ahli Teknik Bangunan Gedung
Building Engineer

Sertifikat ini berlaku untuk 5 (lima) tahun
This certificate is valid for 5 (five) years

Atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi
On Behalf of Indonesia Professional Certification Authority

Lembaga Sertifikasi Profesi Astekindo Konstruksi Mandiri
Astekindo Konstruksi Mandiri Professional Certification Agency

Arrachim Maulana Putera
Ketua LSP
Chairman PCA

COPY ONLY

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
CONSTRUCTION SERVICES DEVELOPMENT BOARD

Daftar Unit Kompetensi:
List of Unit(s) of Competency:

Klasifikasi	:	Sipil
Classification	:	*CIVIL*
Subklasifikasi	:	Gedung
Subclassification	:	*Building*
Kualifikasi	:	Ahli
Qualification	:	*Expert*
Jenjang	:	9 (Sembilan)
Level	:	*9 (Nine)*
Okupasi	:	Ahli Teknik Bangunan Gedung
Occupation	:	*Building Engineer*

Ditetapkan di Jakarta, 06 Desember 2022
Enacted in Jakarta, December 06, 2022



NONO SUHANA, ST., MT.

Keterangan / *Remarks* :

1. Sertifikat ini sah berlaku setelah tercatat yang dibuktikan dengan nomor registrasi Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi. / *This certificate is valid upon being registered as evidenced by registration number of Certificate of Competency of Construction Works.*
2. QR Code dan Data yang tertera dalam sertifikat ini dapat diverifikasi melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. / *QR Code and Data contained herein may be verified through an integrated information system of construction service.*

COPY ONLY

F6896279

BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
INDONESIA PROFESSIONAL CERTIFICATION AUTHORITY

SERTIFIKAT KOMPETENSI
CERTIFICATE OF COMPETENCE

Nomor Sertifikat / *Certificate Number*
74321 2151.99 9 00000311 2023

Dengan ini menyatakan bahwa,
This is to certify that,

ADIYOS ADNIS

No. Reg. F 1997 00311 2023 0059182 ME 05

Telah Kompeten pada bidang:
Is competent in the area of:

Jasa Konstruksi
Construction Services

Dengan Kualifikasi / Kompetensi:
With Qualification / Competency:

Ahli Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung
Building Electrical Expert

Sertifikat ini berlaku untuk 5 (lima) tahun
This certificate is valid for 5 (five) years

Atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi
On Behalf of Indonesia Professional Certification Authority

Lembaga Sertifikasi Profesi Petakindo Konstruksi Mandiri
Petakindo Konstruksi Mandiri Professional Certification Agency

Syamsudin Kurnia Bagia
Ketua LSP
Chairman PCA

COPY ONLY

1/31/23, 8:03 PM Sertifikat SKK ADIYOS ADNIS

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
CONSTRUCTION SERVICES DEVELOPMENT BOARD

Daftar Unit Kompetensi:
List of Unit(s) of Competency:

Klasifikasi	:	Mekanikal
Classification	:	*MECHANICAL*
Subklasifikasi	:	Teknik Mekanikal
Subclassification	:	*Mechanical Engineering*
Kualifikasi	:	Ahli
Qualification	:	*Expert*
Jenjang	:	9 (Sembilan)
Level	:	*9 (Nine)*
Okupasi	:	Ahli Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung
Occupation	:	*Building Electrical Expert*

Ditetapkan di Jakarta, 25 Januari 2023
Enacted in Jakarta, January 25, 2023



ADIYOS ADNIS

Keterangan / Remarks :

1. Sertifikat ini sah berlaku setelah tercatat yang dibuktikan dengan nomor registrasi Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi. / *This certificate is valid upon being registered as evidenced by registration number of Certificate of Competency of Construction Works.*
2. QR Code dan Data yang tertera dalam sertifikat ini dapat diverifikasi melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. / *QR Code and Data contained herein may be verified through an integrated information system of construction service.*

COPY ONLY



F7127327

BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
INDONESIA PROFESSIONAL CERTIFICATION AUTHORITY

SERTIFIKAT KOMPETENSI
CERTIFICATE OF COMPETENCE

Nomor Sertifikat / *Certificate Number*
74321 2142.06 9 00001843 2023

Dengan ini menyatakan bahwa:
This is to certify that:

SAUT MARULI HUTAGAOL, ST

No.Reg. F 2122 01843 2023 0236545 SI 04

Telah Kompeten pada bidang:
Is competent in the area of:

Jasa Konstruksi
Construction Services

Dengan Kualifikasi / Kompetensi:
With Qualification / Competency:

Ahli Utama Teknik Jembatan
Master Bridge Engineering

Sertifikat ini berlaku untuk 5 (lima) tahun
This certificate is valid for 5 (five) years

Atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi
On Behalf of Indonesia Professional Certification Authority

Lembaga Sertifikasi Profesi Infrastruktur Jalan dan Jembatan Indonesia
Infrastruktur Jalan dan Jembatan Indonesia Professional Certification Agency

Ir. Iwan Zarkasi, M.Eng.Sc
Ketua LSP
Chairman PCA

COPY ONLY



LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
CONSTRUCTION SERVICES DEVELOPMENT BOARD

Daftar Unit Kompetensi:
List of Unit(s) of Competency:

Klasifikasi	:	SIPIL
Classification	:	*CIVIL*
Subklasifikasi	:	Jembatan
Subclassification	:	*Bridge*
Kualifikasi	:	Ahli
Qualification	:	*Expert*
Jenjang	:	9 (Sembilan)
Level	:	*9 (Nine)*
Okupasi	:	Ahli Utama Teknik Jembatan
Occupation	:	*Master Bridge Engineering*

Ditetapkan di Jakarta, 20 Desember 2023
Enacted in Jakarta, December 20, 2023

SAUT MARULI HUTAGAOL, ST

Keterangan / *Remarks* :

1. Sertifikat ini sah berlaku setelah tercatat yang dibuktikan dengan nomor registrasi Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi. / *This certificate is valid upon being registered as evidenced by registration number of Certificate of Competency of Construction Works.*
2. QR Code dan Data yang tertera dalam sertifikat ini dapat diverifikasi melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. / *QR Code and Data contained herein may be verified through an integrated information system of construction service.*

COPY ONLY

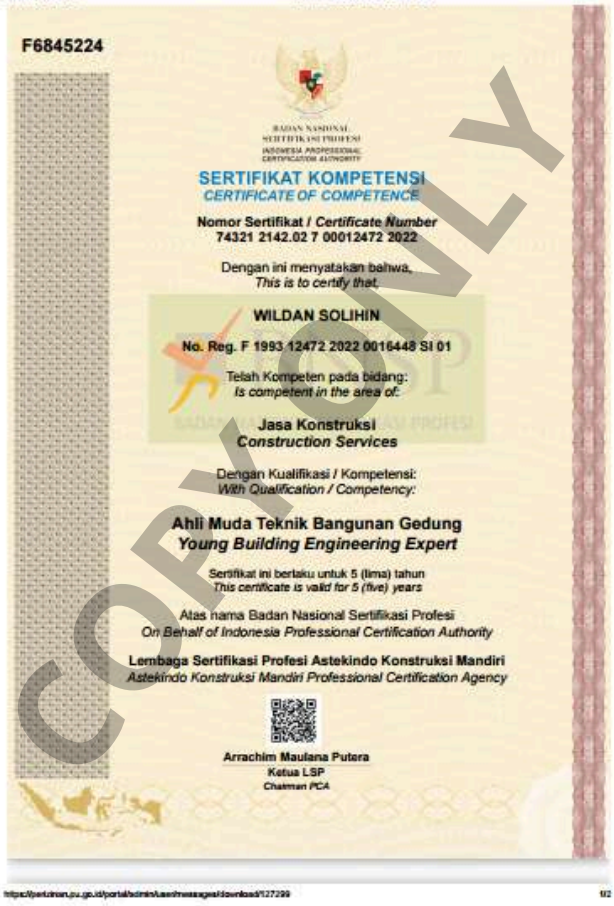

F6845224

BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
INDONESIA PROFESSIONAL CERTIFICATION AUTHORITY

SERTIFIKAT KOMPETENSI
CERTIFICATE OF COMPETENCE

Nomor Sertifikat / *Certificate Number*
74321 2142.02 7 00012472 2022

Dengan ini menyatakan bahwa,
This is to certify that

WILDAN SOLIHIN

No. Reg. F 1993 12472 2022 0016448 SI 01

Telah Kompeten pada bidang:
Is competent in the area of:

Jasa Konstruksi
Construction Services

Dengan Kualifikasi / Kompetensi:
With Qualification / Competency:

Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung
Young Building Engineering Expert

Sertifikat ini berlaku untuk 5 (lima) tahun
This certificate is valid for 5 (five) years

Atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi
On Behalf of Indonesia Professional Certification Authority

Lembaga Sertifikasi Profesi Astekindo Konstruksi Mandiri
Astekindo Konstruksi Mandiri Professional Certification Agency

Arrachim Maulana Putera
Ketua LSP
Chairman PCA

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
CONSTRUCTION SERVICES DEVELOPMENT BOARD

Daftar Unit Kompetensi:
List of Unit(s) of Competency:

Klasifikasi *Classification*	: :	Sipil *CIVIL*
Subklasifikasi *Subclassification*	: :	Gedung *Building*
Kualifikasi *Qualification*	: :	Ahli *Expert*
Jenjang *Level*	: :	7 (Tujuh) *7 (Seven)*
Okupasi *Occupation*	: :	Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung *Young Building Engineering Expert*

Ditetapkan di Jakarta, 30 Agustus 2022
Enacted in Jakarta, August 30, 2022



WILDAN SOLIHIN

Keterangan / Remarks :

1. Sertifikat ini sah berlaku setelah tercatat yang dibuktikan dengan nomor registrasi Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi. / *This certificate is valid upon being registered as evidenced by registration number of Certificate of Competency of Contruction Works.*
2. QR Code dan Data yang tertera dalam sertifikat ini dapat diverifikasi melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. / *QR Code and Data contained herein may be verified through an integrated information system of construction service.*

COPY ONLY



F7262876

SERTIFIKAT KOMPETENSI
CERTIFICATE OF COMPETENCE

Nomor Sertifikat / *Certificate Number*
74321 2142.02 7 00038440 2024

Dengan ini menyatakan bahwa,
This is to certify that:

MUHAMMAD FAIZAL RAMADHAN

No. Reg. F 1993 38440 2024 0335743 SI 01

Telah Kompeten pada bidang:
Is competent in the area of:

Jasa Konstruksi
Construction Services

Dengan Kualifikasi / Kompetensi:
With Qualification / Competency:

Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung
Young Building Engineering Expert

Sertifikat ini berlaku untuk 5 (lima) tahun
This certificate is valid for 5 (five) years

Atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi
On Behalf of Indonesia Professional Certification Authority

Lembaga Sertifikasi Profesi Asteksindo Konstruksi Mandiri
Asteksindo Konstruksi Mandiri Professional Certification Agency

Yosep Fernando Putra, S.T.
Ketua LSP
Chairman PCA

COPY ONLY



LEMBAGA PENGEMBANGAN
JASA KONSTRUKSI
CONSTRUCTION SERVICES
DEVELOPMENT BOARD

Daftar Unit Kompetensi:
List of Unit(s) of Competency:

Klasifikasi	:	Sipil
Classification	:	*Civil*
Subklasifikasi	:	Gedung
Subclassification	:	*Building*
Kualifikasi	:	Ahli
Qualification	:	*Expert*
Jenjang	:	7 (Tujuh)
Level	:	*7 (Seven)*
Okupasi	:	Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung
Occupation	:	*Young Building Engineering Expert*

Ditetapkan di Jakarta, 05 Agustus 2024
Enacted in Jakarta, August 05, 2024

MUHAMMAD FAIZAL
RAMADHAN

COPY ONLY

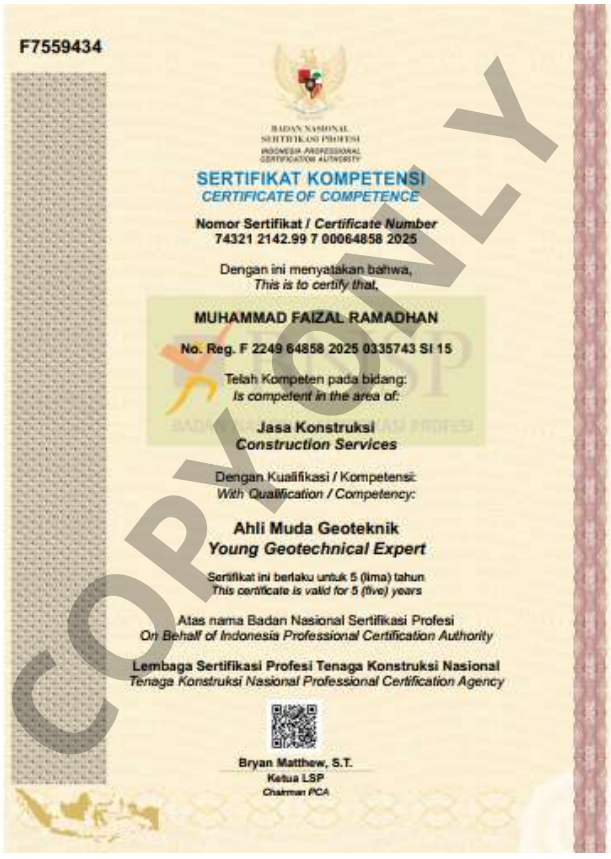

F7559434

BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
INDONESIA PROFESSIONAL CERTIFICATION AUTHORITY

SERTIFIKAT KOMPETENSI
CERTIFICATE OF COMPETENCE

Nomor Sertifikat / *Certificate Number*
74321 2142.99 7 00064858 2025

Dengan ini menyatakan bahwa,
This is to certify that,

MUHAMMAD FAIZAL RAMADHAN

No. Reg. F 2249 64858 2025 0335743 SI 15

Telah Kompeten pada bidang:
Is competent in the area of:

Jasa Konstruksi
Construction Services

Dengan Kualifikasi / Kompetensi:
With Qualification / Competency:

Ahli Muda Geoteknik
Young Geotechnical Expert

Sertifikat ini berlaku untuk 5 (lima) tahun
This certificate is valid for 5 (five) years

Atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi
On Behalf of Indonesia Professional Certification Authority

Lembaga Sertifikasi Profesi Tenaga Konstruksi Nasional
Tenaga Konstruksi Nasional Professional Certification Agency

Bryan Matthew, S.T.
Ketua LSP
Chairman PCA

COPY ONLY



LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
CONSTRUCTION SERVICES DEVELOPMENT BOARD

Daftar Unit Kompetensi:
List of Unit(s) of Competency:

Klasifikasi	:	Sipil
Classification	:	*Civil*
Subklasifikasi	:	Geoteknik Dan Pondasi
Subclassification	:	*Geotechnical And Foundation*
Kualifikasi	:	Ahli
Qualification	:	*Expert*
Jenjang	:	7 (Tujuh)
Level	:	*7 (Seven)*
Okupasi	:	Ahli Muda Geoteknik
Occupation	:	*Young Geotechnical Expert*

Ditetapkan di Jakarta, 21 November 2025
Enacted in Jakarta, November 21, 2025

MUHAMMAD FAIZAL RAMADHAN

Keterangan / Remarks :

1. Sertifikat ini sah berlaku setelah teregistrasi yang dibuktikan dengan nomor registrasi Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi. / *This certificate is valid upon being registered as evidenced by registration number of Certificate of Competency of Construction Works.*
2. QR Code dan Data yang tertera dalam sertifikat ini dapat diverifikasi melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. / *QR Code and Data contained herein may be verified through an integrated information system of construction service.*

COPY ONLY

F7525260

BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
INDONESIA PROFESSIONAL CERTIFICATION AUTHORITY

SERTIFIKAT KOMPETENSI
CERTIFICATE OF COMPETENCE

Nomor Sertifikat / *Certificate Number*
74321 3112.05 6 00041147 2025

Dengan ini menyatakan bahwa,
This is to certify that,

REZA MUHAMMAD FADHLI

No. Reg. F 1993 41147 2025 0524476 SI 15

Telah Kompeten pada bidang:
is competent in the area of:

Jasa Konstruksi
Construction Services

Dengan Kualifikasi / Kompetensi:
With Qualification / Competency:

Teknisi Geoteknik
Geotechnical Technician

Sertifikat ini berlaku untuk 5 (lima) tahun
This certificate is valid for 5 (five) years

Atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi
On Behalf of Indonesia Professional Certification Authority

Lembaga Sertifikasi Profesi Astekindo Konstruksi Mandiri
Astekindo Konstruksi Mandiri Professional Certification Agency

Yosep Fernando Putra, S.T.
Ketua LSP
Chairman PCA

COPY ONLY

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
CONSTRUCTION SERVICES DEVELOPMENT BOARD

Daftar Unit Kompetensi:
List of Unit(s) of Competency:

Klasifikasi *Classification*	: :	Sipil *Civil*
Subklasifikasi *Subclassification*	: :	Geoteknik Dan Pondasi *Geotechnical And Foundation*
Kualifikasi *Qualification*	: :	Teknisi/ Analis *Technician/ Analyst*
Jenjang *Level*	: :	6 (Enam) *6 (Six)*
Okupasi *Occupation*	: :	Teknisi Geoteknik *Geotechnical Technician*

Ditetapkan di Jakarta, 24 September 2025
Enacted in Jakarta, September 24, 2025



REZA MUHAMMAD FADHLI

Keterangan / Remarks :

1. Sertifikat ini sah berlaku setelah tercatat yang dibuktikan dengan nomor registrasi Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi. / *This certificate is valid upon being registered as evidenced by registration number of Certificate of Competency of Construction Works.*
2. QR Code dan Data yang terkait dalam sertifikat ini dapat diverifikasi melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. / *QR Code and Data contained herein may be verified through an integrated information system of construction service.*

COPY ONLY

SBU JASA PENGUJIAN HASIL PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN FASILITAS LABORATORIUM (AT003)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT BADAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
NOMOR: 202512171006258908590

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Badan Usaha (SBU), yang merupakan tanda bukti pengakuan kemampuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1.	Nama Pelaku Usaha	: PT BINANUSA PRACETAK DAN REKAYASA
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 0213010150695
3.	Alamat Kantor	: JL. GEGERKALONG HILIR NO. 175
4.	Status Penanaman Modal	: Penanaman Modal Dalam Negeri
5.	Kode KBLI	: 71102 - Aktivitas Keinsinyuran Dan Konsultasi Teknis Ybdi
6.	Lokasi Usaha	: JL. GEGERKALONG HILIR NO. 175

Telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam lampiran SBU yang memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal : 18 Desember 2025
Dicetak tanggal : 18 Desember 2025

a.n. Menteri Pekerjaan Umum
Direktur Jenderal Bina Konstruksi
Bobby Ali Azhari
Ditandatangani secara elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
NOMOR: 202512171006258908590

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa PT BINANUSA PRACETAK DAN REKAYASA:

Asosiasi yang diikuti	: PERKINDO
Nama PJBU	: IKHWANUL AMRIL
Nama PJTBU	: SJAFEI AMRI / F 1993 117623 2023 0092064 SI 15
Nama PJTBU 2	: -
E-mail	: admin@binanusa.co.id
NPWP	: 0019359348428000
Jenis Usaha	: Jasa Konsultansi Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK	: F.3.02.AT.Spesialis.16.2025.0030805
Ditetapkan tanggal	: 2025-12-18
Masa Berlaku s.d.	: 2028-12-17

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagai berikut:

Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subklas	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	-	AT003	Spesialis	71102	Jasa Pengujian Hasil Pekerjaan Konstruksi dan Fasilitas Laboratorium	MUHAMMAD FAIZAL RAMADHAN F 2249 64858 2025 0335743 SI 15
Pelaksana sertifikasi : PERKONINDO KONSULTAN KONSTRUKSI MANDIRI						

Keterangan:
Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakonstruksi.

SBU AKTIVITAS ARSITEKTUR (AR001)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA
(SBU) KONSTRUKSI
PB-UMKU: 02130101506950004002

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1.	Nama Pelaku Usaha	: PT BINANUSA PRACETAK DAN REKAYASA
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 0213010150695
3.	Alamat Kantor	: JL. GEGERKALONG HILIR NO. 175, Desa/Kelurahan Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40151
4.	Status Penanaman Modal	: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5.	Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 71101 - Aktivitas Arsitektur
6.	Lokasi Usaha	: Jl. Gegerkalong Hilir 175 Desa/Kelurahan Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40151

Telah memenuhi persyaratan:
1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)
2. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 20 Februari 2023

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Diolah tanggal: 20 Februari 2023



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 02130101506950004002

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa PT. BINANUSA PRACETAK DAN REKAYASA:

Asosiasi yang diikuti	: PERKINDO
Nama PJBU	: IKHWANUL AMRIL
Nama PJTBU	: SJAFEI AMRI / 1.2.201.1.076.09.1100950
Nama PJTBU 2	: --
E-mail	: corporate@binanusa.co.id
NPWP	: 019359348428000
Jenis Usaha	: Jasa Konsultansi Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK	: F.3.01.AR.K.11.2023.0830805
Ditetapkan tanggal	: 2023-02-20
Masa Berlaku s.d.	: 2026-02-19

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.

Keterangan:
Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Javantrust.

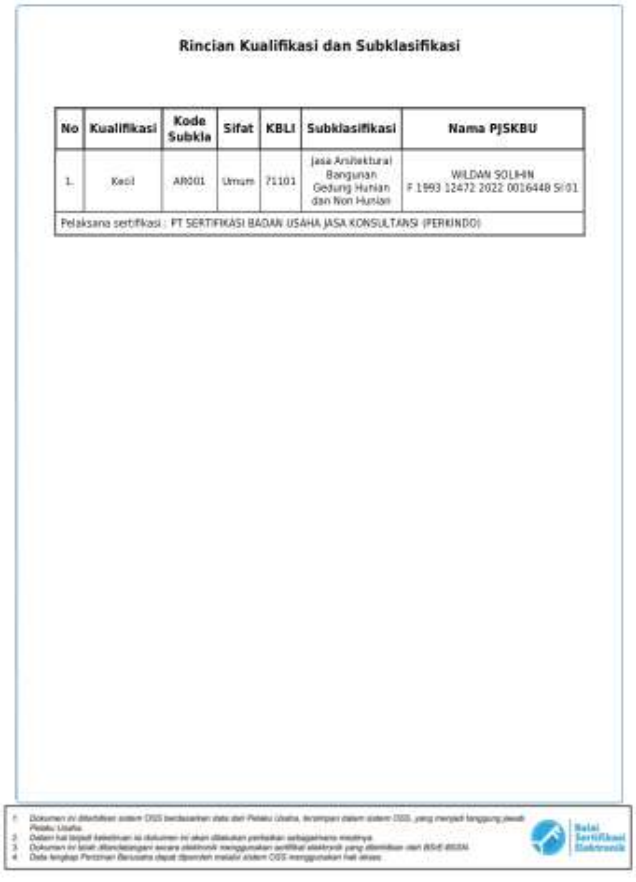

Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	AR001	Umum	71101	Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian	WILDAN SOLIHIN F 1993 12472 2022 0016448 SI 01
Pelaksana sertifikasi : PT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI (PERKINDO)						

SBU AKTIVITAS ARSITEKTUR LAINNYA (AR002)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA
(SBU) KONSTRUKSI
PB-UMKU: 02130101506950001000 3

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1.	Nama Pelaku Usaha	: PT BINANUSA PRACETAK DAN REKAYASA
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 0213010150695
3.	Alamat Kantor	: JL. GEGERKALONG HILIR NO. 175, Desa/Kelurahan Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40151
4.	Status Penanaman Modal	: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5.	Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 71101 - Aktivitas Arsitektur
6.	Lokasi Usaha	: Jl. Gegerkalong Hilir 175 Desa/Kelurahan Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40151

Telah memenuhi persyaratan:
1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)
2. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 12 September 2023
Perubahan ke-1, tanggal:

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 12 September 2023





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 02130101506950001000 3

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa PT. BINANUSA PRACETAK DAN REKAYASA:

Asosiasi yang diikuti	: PERKINDO
Nama PJBU	: IKHWANUL AMRIL
Nama PJTBU	: SJAFEI AMRI / F 1993 34155 2023 0092064 SI 01
Nama PJTBU 2	: --
E-mail	: corporate@binanusa.co.id
NPWP	: 019359348428000
Jenis Usaha	: Jasa Konsultansi Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK	: F.3.01.AR.K.11.2023.0030805
Ditetapkan tanggal	: 2023-09-12
Masa Berlaku s.d.	: 2026-09-11

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.

Keterangan:
Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakontrust.

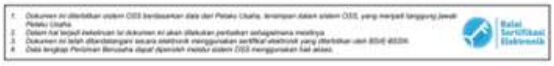

Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	AR002	Umum	71101	Jasa Arsitektural Lainnya	WILDAN SOLIHIN F 1993 12472 2022 0016448 SI 01
Pelaksana sertifikasi : PT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI (PERKINDO)						



SBU AKTIVITAS DESAIN INTERIOR BANGUNAN GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL (AR003)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA
(SBU) KONSTRUKSI
PB-UMKU: 02130101506950004003

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : PT BINANUSA PRACETAK DAN REKAYASA
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0213810150806
3. Alamat Kantor : JL. GEGERKALONG HILIR NO. 175, Desa/Kelurahan Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat
   Kode Pos: 40151
4. Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 74120 - Aktivitas Desain Interior
6. Lokasi Usaha : Jl. Gegerkalong Hilir 175 Desa/Kelurahan Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat
   Kode Pos: 40151

Telah memenuhi persyaratan:
1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)
2. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 20 Februari 2023

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 20 Februari 2023



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 02130101506950004003

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa PT. BINANUSA PRACETAK DAN REKAYASA:

Asosiasi yang dilkuti	: PERKINDO
Nama PJBU	: IKHWANUL AMRIL
Nama PJTBU	: SJAFEI AMRI / 1.2.201.1.076.09.1100950
Nama PJTBU 2	: --
E-mail	: corporate@binanusa.co.id
NPWP	: 019359348428000
Jenis Usaha	: Jasa Konsultansi Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK	: F.3.01.AR.K.11.2023.0030805
Ditetapkan tanggal	: 2023-02-20
Masa Berlaku s.d.	: 2026-02-19

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.

Keterangan:
Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakontrust.



Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	AR002	Umum	71101	Jasa Arsitektural Lainnya	WILDAN SOLHIN F 1993 12472 2022 0016448 SI 01
Pelaksana sertifikasi : PT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI (PERKINDO)						

SBU AKTIVITAS REKAYASA KONSTRUKSI GEDUNG HUNIAN DAN NON HUNIAN (RK001)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA
(SBU) KONSTRUKSI
PB-UMKU: 02130101506950009000 1

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : PT BINANUSA PRACETAK DAN REKAYASA
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0213010150695
3. Alamat Kantor : Jl., GEGERKALONG HILIR NO. 175, Desa/Kelurahan Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40151
4. Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 71102 - Aktivitas Konsultansi dan Konsultasi Teknis YBDI
6. Lokasi Usaha : Jl. Gegerkalong Hilir No. 175 Desa/Kelurahan Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40151

Telah Memenuhi Persyaratan:
1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)
2. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 11 November 2024

a.n. Menteri Pekerjaan Umum
Menteri Investasi dan Hilirisasi
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 18 November 2024

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 02130101506950009000 1

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa PT. BINANUSA PRACETAK DAN REKAYASA:

Asosiasi yang diikuti	: PERKINDO
Nama PJBU	: IKHWANUL AMRIL
Nama PJTBU	: SJAFEI AMRI / F 1993 34155 2023 0092064 SI 01
Nama PJTBU 2	: --
E-mail	: corporate@binanusa.co.id
NPWP	: 019359348428000
Jenis Usaha	: Jasa Konsultansi Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK	: F.3.01.RK.K.11.2024.0030805
Ditetapkan tanggal	: 2024-11-11
Masa Berlaku s.d.	: 2027-11-10

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.

Keterangan:
Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakonstruk.

Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	RK001	Umum	71102	Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian	MUHAMMAD FAIZAL RAMADHAN F 1993 38440 2024 0335743 SI 01
Pelaksana sertifikasi : PT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI (PERKINDO)						

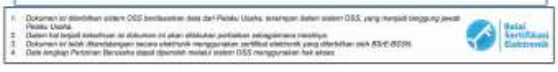

SBU JASA REKAYASA PEKERJAAN TEKNIK SIPIL TRANSPORTASI(RK003)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT BADAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
NOMOR: 20260106130814771070

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Badan Usaha (SBU), yang merupakan tanda bukti pengakuan kemampuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1.	Nama Pelaku Usaha	: PT BINANUSA PRACETAK DAN REKAYASA
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 0213010150695
3.	Alamat Kantor	: JL. GEGERKALONG HILIR NO. 175
4.	Status Penanaman Modal	: Penanaman Modal Dalam Negeri
5.	Kode KBLI	: 71102 - Aktivitas Keinsinyuran Dan Konsultasi Teknis Ybdl
6.	Lokasi Usaha	: JL. GEGERKALONG HILIR NO. 175

Telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam lampiran SBU yang memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal : 9 Januari 2026
Dicetak tanggal : 9 Januari 2026

a.n. Menteri Pekerjaan Umum
Direktur Jenderal Bina Konstruksi
Iloby Ali Akbari
Ditandatangani secara elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
NOMOR: 20260106130814771070

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa PT BINANUSA PRACETAK DAN REKAYASA:

Asosiasi yang diikuti	: PERKINDO
Nama PJBU	: IKHWANUL AMRIL
Nama PJTBU	: SJAFEI AMRI / F 1993 117623 2023 0092064 SI 15
Nama PJTBU 2	: -
E-mail	: admin@binanusa.co.id
NPWP	: 0019359348428000
Jenis Usaha	: Jasa Konsultansi Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK	: F.3.01.RK.K.16.2026.0030805
Ditetapkan tanggal	: 2026-01-09
Masa Berlaku s.d.	: 2029-01-08

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagai berikut:

Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subklas	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	RK003	Umum	71102	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	REZA MUHAMMAD FADHLI F 1993 41147 2025 0524476 SI 15
Pelaksana sertifikasi : PERKINDO KONSULTAN KONSTRUKSI MANDIRI						

Keterangan:
Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakontrust.

SBU AKTIVITAS REKAYASA MEKANIKAL DALAM BANGUNAN (RK004)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA
(SBU) KONSTRUKSI
PB-UMKU: 02130101506950005000 1

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1.	Nama Pelaku Usaha	: PT BINANUSA PRACETAK DAN REKAYASA
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 0213010150695
3.	Alamat Kantor	: JL. GEGERKALONG HILIR NO. 175, Desa/Kelurahan Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40151
4.	Status Penanaman Modal	: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5.	Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 71102 - Aktivitas Konsultansi Teknis YBDI
6.	Lokasi Usaha	: Jl. Gegerkalong Hilir 175 Kelurahan: Sarijadi Kecamatan: Sukasari Kab/Kota: Kota Bandung Provinsi: Jawa Barat Desa/Kelurahan Sarijadi. Kec. Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40151

Telah memenuhi persyaratan:
1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)
2. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 12 September 2023

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Diunduh tanggal: 12 September 2023

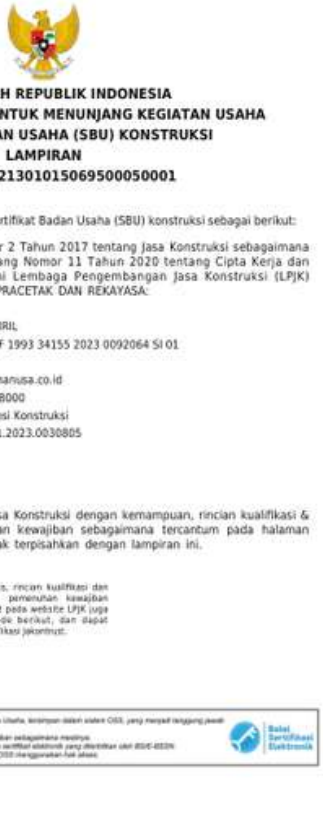

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 02130101506950005000 1

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa PT. BINANUSA PRACETAK DAN REKAYASA:

Asosiasi yang diikuti	: PERKINDO
Nama PJBU	: IKHWANUL AMRIL
Nama PJTBU	: SJAFEI AMRI / F 1993 34155 2023 0092064 SI 01
Nama PJTBU 2	: --
E-mail	: corporate@binanusa.co.id
NPWP	: 019359348428000
Jenis Usaha	: Jasa Konsultansi Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK	: F.3.01.RK.K.11.2023.0030805
Ditetapkan tanggal	: 2023-09-12
Masa Berlaku s.d.	: 2026-09-11

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.

Keterangan:
Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakonstruk.



Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	RK004	Umum	71102	Jasa Rekayasa Pekerjaan Mekanikal Dalam Bangunan	ADIYOS ADNIS F 1997 00311 2023 0059182 ME 05
Pelaksana sertifikasi : PT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI (PERKINDO)						

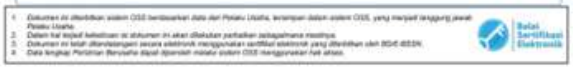

LAPORAN PAJAK TAHUNAN BADAN

2022

Penyampaian SPT Elektronik
Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : BINANUSA PRACETAK REKAYASA
NPWP : 019359348428000
Tahun Pajak : 2022
Masa Pajak : 01/12
Jenis SPT : 1771
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Nihil
Nominal : 0
Tanggal Penyampaian : 28/04/2023
Nomor Tanda Terima Elektronik : 82348406552231028031

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

2023

Penyampaian SPT Elektronik
Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : BINANUSA PRACETAK REKAYASA
NPWP : 019359348428000
Tahun Pajak : 2023
Masa Pajak : 01/12
Jenis SPT : 1771
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Nihil
Nominal : 0
Tanggal Penyampaian : 29/04/2024
Nomor Tanda Terima Elektronik : 55348406559241029532

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

2024

Penyampaian SPT Elektronik
© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : BINANUSA PRACETAK REKAYASA
NPWP :019359348428000 / 0019359348428000
NITKU :00193593484280000000000
Tahun Pajak : 2024
Masa Pajak : 01-12
Jenis SPT : 1771
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Nihil
Nominal :0
Tanggal Penyampaian : 01/05/2025
Nomor Tanda Terima Elektronik : 91348506556251001710
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

BINANUSA

Telp. +62.22.2003252
e-Mail : corporate@binanusa.co.id
www.binanusa.co.id

SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN REKENING

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Ikhwanul Amril
NIK KTP	: 3273011707860002
Alamat	: Jalan Cijerokaso No.67 Kec. Sukasari, Kel Sarijadi, Kota Bandung

Menyatakan bahwa benar untuk nomor rekening berikut ini adalah milik PT Binanusa Pracetak & Rekayasa dan digunakan untuk kepentingan Perusahaan :

No Rekening	: 800.11.43572.00
Nama Bank	: CIMB Niaga Cab. Jalan Setiabudi Bandung
Nama Rekening	: Binanusa Pracetak & Rekayasa

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bandung, 20 Desember 2024



Ikhwanul Amril
Direktur Utama

KLIEN


adhi
Bakrie
WASKITA
JAYA KONSTRUKSI
WiKA
PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG
bank bjb
PT INDAH KARYA (Persero)
PP
CONSTRUCTION & INVESTMENT
bioforma
PT CG Power Systems Indonesia
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
BNI
Syariah
BCA
syariah
PaninBank
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BNI
Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa
UBL
Aerofood ACS
GARUDA INDONESIA GROUP
Jakarta International
Container Terminal
RSUD
BANTEN
CIMB NIAGA
TIGA RODA
SEMEN
INDOCEMENT
TAKENAKA
PT. TAKENAKA INDONESIA
bki
BANK BUKOPIN
ABIPRAYA
rskia
bandung
Len
TOTAL
BANGUN PERSADA
KAI
Maybank
NASIONALRE
Reinsurance
Rumah Sakit
Grha PERMATA IBU
thyssenkrupp
bbp
PT. Seacon Bintang Sejahtera
IG
PT. PERUMNAS IIDA GROUP
KPPN
CITRA
SERAYA
Home Building Center
RAP
JAPFA
GUNA
ROGATE
INDAH
GÀIÀ
HOTEL
PT. GARUDA MITRA SEJATI
MILLENNIUM
HOTEL
SIRIH JAKARTA
PT. TATA INSPEK ORIENTAL
Linde
GMFAeroAsia
INDOMARCO
PT Indomarco Adi Prima
SIS
Singapore Intercultural School
kimia farma
LG
POIN
PUSAT OTOMOTIF

PENGALAMAN PEKERJAAN

Pengalaman pekerjaan PT Binanusa Pracetak & Rekayasa selama 24 (Dua Puluh Empat) tahun terakhir meliputi berbagai kegiatan perencanaan, investigasi, pengawasan, survey, perbaikan gedung, jembatan dan pelabuhan hampir di seluruh Indonesia yang sudah kami lakukan, berikut merupakan beberapa proyek yang pernah kami kerjakan :



SURVEY EXISTING FACILITIES PERTAMINA RDMP RU-V, BALIKPAPAN



ASSESSMENT DAN ANALISA KEANDALAN STRUKTUR GEDUNG DPR RI, JAKARTA



ASSESSMENT STRUKTUR BANGUNAN PT BIOFARMA, BANDUNG



PENGUJIAN LOADING TEST PADA JEMBATAN TELUK KENDARI, SULAWESI



ASSESSMENT DAN ANALISA KEANDALAN STRUKTUR KOLAM RENANG HOTEL GAIA, BANDUNG



ASSESSMENT DAN ANALISA KEANDALAN STRUKTUR 2 TOWER GEDUNG JAPFA INDOLAND CENTER, SURABAY



ASSESSMENT BANGUNAN MONUMEN SAMUDERA PASAI, ACEH



ASSESSMENT BANGUNAN GEDUNG WISMA ATLET, JAKARTA



ASSESSMENT DAN ANALISA KEANDALAN STRUKTUR 2 TOWER GEDUNG JAPFA INDOLAND CENTER, SURABAY

PENGALAMAN PROYEK TAHUN 2020

NO	PEKERJAAN	JENIS	NAMA KLIEN
1	Analisis Kehandalan Struktur Bangunan Gedung PT. Reasuransi Nasional Indonesia, Jakarta Pusat	GEDUNG	PT BINANUSA
2	Assessment Bangunan RSUD, Soreang	GEDUNG	PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERSERO
3	Assessment Struktur Bangunan PT. Astra Daihatsu Gedung Underbody, Bekasi	GEDUNG	PT ASTRA DAIHATSU
4	Assessment Gedung PT. Pegadaian (Persero), Jakarta	GEDUNG	PT. REKA PRIMA
5	Analisis Struktur Bandara Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru	GEDUNG	INDIVIDU
6	Assessment Struktur Bangunan RSUD Banten, Bantani	GEDUNG	UPT DINAS KESEHATAN BANTEN
7	Assessment Struktur Bangunan KPK, Jakarta	GEDUNG	PT. REKA PRIMA
8	Assessment Struktur Bangunan Ruko Metro Sunter, Jakarta	GEDUNG	BPK. NURMANTIAS
9	Assessment Struktur Pelabuhan Pertamina RU VII Kasim, Sorong Papua	PELABUHAN	PT. LAPI ITB
10	Assessment Struktur Bangunan Jembatan Air Buluh dan Air Lubuk Raman, Sumatera Selatan	JEMBATAN	PT. REKA ANUGRAH CIPTA MANDIRI
11	Assessment Struktur Bangunan Jembatan Kelakar, Sumatera Selatan	JEMBATAN	PT. REKA ANUGRAH CIPTA MANDIRI
12	Assessment Struktur Jembatan simpang air II, Sumatera Selatan	JEMBATAN	PT. MEGASARI SEJATI
13	Assessment Struktur Trafo GI 150 kV Tawaeli Palu, sulawesi Tengah	BENDUNGAN	PT NIAGAMAS SETIAUSAHA
14	Assessment Struktur Bangunan Pertamina RU Balongan, Indramayu	BENDUNGAN	PT REKAYASA INDUSTRI
15	Assessment Struktur Pondasi Tembok Penahan Tanah Jalan, Labuan Bajo	BENDUNGAN	CV. BETA TAU ENGINEERING
16	Loading Test Struktur Jembatan, Teluk Kendari	JEMBATAN	PDCM
17	Assessment Struktur Bangunan Dermaga Petikemas Koja, Jakarta	PELABUHAN	PT. HAJAR ASWAD KONSTRUKINDO
18	Assessment Struktur Bangunan Universitas Tadulako, Palu	GEDUNG	PT. GEOCIPTA BANGUN OPTIMA
19	Assessment Struktur Bangunan Pasar Pulung Kencana, Lampung	GEDUNG	LABORATORIUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
20	Assessment Struktur Bangunan Wisma Atlet, Kemayoran	GEDUNG	PT. ADHI KARYA

21	Assessment Bangunan Gedung BKD Dan Dishub, Provinsi Banten	GEDUNG	UNIVERSITAS MATHLA'UL ANWAR BANTEN
22	Penggantian Elastomeric Rubber Bearing dan Perbaikan Beton Jembatan, Papua	JEMBATAN	PT. BINANUSA
23	Assessment Jembatan Kota Baru Parahiangan, Bandung	JEMBATAN	INDIVIDU
24	Assessment Struktur Bangunan Jetty PT. Siam Maspion Terminal, Gresik	PELABUHAN	PT. ATRYA SWASCIPTA REKAYASA
25	Assessment Struktur Bangunan Jetty PT Asahimas Chemical, Jakarta	PELABUHAN	PT. ATRYA SWASCIPTA REKAYASA
26	Assessment Struktur Gedung PT. Biofarma, Bandung	GEDUNG	PT BIOFARMA
27	Assessment dan RE Engineering Terminal, Bandung	GEDUNG	PT LAPI ITB
28	Assessment & Analisis Dermaga Redco, Jakarta	PELABUHAN	PT BIRO KLASIFIKASI
29	Perbaikan dan Penguatan Struktur Bangunan Reasuransi Nasional Indonesia, Jakarta	GEDUNG	PT REASURANSI

PENGALAMAN PROYEK TAHUN 2021

NO	PEKERJAAN	JENIS	NAMA KLIEN
1	Assessment Struktur Jembatan Kuning Kota Baru Parahyangan, Bandung	JEMBATAN	INDIVIDU
2	Assessment Struktur Gedung Ikea, Bandung	GEDUNG	PT. TOTAL BANGUN PERSADA
3	Assessment Struktur Bangunan Silo 2 Tuban, Jawa Timur	BENDUNG/PEMBANGKIT	THYSSENKRUPP INDUSTRIALS SOLUTIONS
4	Assessment Struktur Bangunan Gedung Hotel Karmila, Bandung	GEDUNG	INDIVIDU
5	Assessment Struktur Bangunan Corrugated Concrete Sheet Pile (CCSP), Jakarta	BENDUNGAN	PT ADHI KARYA
6	Assessment Bangunan Hanggar 4 PT. Garuda Maintenance Facility (Gmf) Aeroasia, Jakarta	GEDUNG	PT WIJAYA KARYA
7	Assessment Kualitas Homogenitas Beton Pier Jembatan Pulau Gadang 1 Proyek Tol, Pekanbaru - Padang	JEMBATAN	PT WIJAYA KARYA
8	Assessment Komponen Struktur Bangunan Gedung Puskurbuk Kemendikbud, Jakarta	GEDUNG	PT CIPTA MANDIRI PERENCANA
9	Assessment Bangunan Gedung Hangar 4 Pt. Garuda Maintenance Facility (Gmf) Aeroasia, Jakarta	GEDUNG	PT GARUDA MAINTENANCE FACILITY
10	Assessment Komponen Struktur Bangunan Gedung Nusantara II, Jakarta	GEDUNG	PT DIAS DESIGN CONSUL
11	Assessment Struktur Gedung KPPN, Jakrta	GEDUNG	KPPN I
12	Assessment Struktur Pondasi PJU Jawa Barat Dan Banten PT. Len Industri (Persero), Banten	GEDUNG	PT LEN INDUSTRI (PERSERO)
13	Assessment Komponen Struktur Pier Head Ju Tiram Jalan Tol, Cibitung Cilincing	JEMBATAN	PT WASKITA BETON PRECAST
14	Penyelidikan Tanah Komplek Dago Resort, Bandung	GEDUNG	PT BINANUSA
15	Assessment Komponen Struktur Pelabuhan Pantoloan, Wani Dan Pelabuhan Donggala, Sulawesi Tengah	PELABUHAN	PT ATRYA SWASCIPTA REKAYASA
16	Assessment Pada Biem Pile Cap Jembatan Mahkota 2, Samarinda – Kalimantan Timur	JEMBATAN	PT PDCM
17	Assessment Dan Re-Analisis Struktur Pada Bangunan Gedung RSUD Labuan, Banten	GEDUNG	PT PANCA GUNA DUTA
18	Assessment Pada Jembatan Ruas, Jambi – Padang	JEMBATAN	PT GEOTEKNO SYSTEM ENGINEERING
19	Assessment Bangunan Gedung Hangar 4 Pt. Garuda Maintenance Facility (Gmf) Aeroasia Tbk, Jakarta	GEDUNG	PT WIJAYA KARYA

20	Assessment Komponen Struktur Bangunan Gedung Puskurbuk Kemendikbud, Jakarta	GEDUNG	PT CIPTA MANDIRI PERENCANA
21	Assessment Dan Analisa Kehandalan Struktur Bangunan Gedung Kppn Gambir Kota, Jakarta	GEDUNG	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN
22	Assessment Building Vokasi Tahun 2021 (YTKI), Jakarta	GEDUNG	PT REKA PRIMA
23	Assessment Bangunan Gedung 37 Biofarma, Bandung	GEDUNG	PT WIJAYA KARYA
24	Assessment Rumah Sakit Borromeus, Bandung	GEDUNG	RUMAH SAKIT BORROMEUS
25	Assessment Kualitas Homogenitas Beton & Kedalaman Retakan Gedung Ikea, Bandung	GEDUNG	PT. TOTAL BANGUN PERSADA
26	Assessment Bangunan Gedung Galeri Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI), Bandung	GEDUNG	INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA (ISBI)
27	Pile Integrity Test Survey for RDMP Project Pertamina RU V, Balikpapan	JETTY	PT SOILENS
28	Assessment Komponen Struktur Bangunan Gedung Puskurbuk Kemendikbud, Bandung	GEDUNG	PT.CIPTA MANDIRI PERENCANA
29	Assessment Struktur Pondasi PJU Jawa Barat Dan Banten PT. LEN Industri, Banten	GEDUNG	PT LEN INDUSTRI
30	Assessment Bangunan Gedung Hangar 4 Pt. Garuda Maintenance Facility (GMF) Aeroasia Tbk, Jakarta	GEDUNG	PT GARUDA MAINTENANCE FACILITY (GMF)
31	Assessment Bangunan Gedung PT. Kereta Api Indonesia Stasiun, Bandung	GEDUNG	PT BUMI BANDA PARAHYANGAN
32	Assessment Bangunan Rumah Sakit Hermina Pasteur,Bandung	GEDUNG	RUMAH SAKIT HERMINA PASTEUR
33	Assessment Gedung BJB KCP Cicadas, Bandung	GEDUNG	BANK BJB KCP
34	Assessment bangunan Gedung parkir PT jaya konstruksi manggala pratama, Jakarta	GEDUNG	PT JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA TBK
35	Analisis Gedung Monumen Islam Samudera Pasai, Aceh	GEDUNG	DIRJEN KEBUDAYAAN
36	Assessment Bangunan Masjid Yayasan Islam Nashirussunnah Permata (YASHIRUNA), Bandung	GEDUNG	YAYASAN ISLAM NASHIRUSSUNNAH PERMATA (YASHIRUNA)
37	Assessment Struktur Tangga Putar Balai Krida, Jakarta Selatan	GEDUNG	KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI
38	Assessment Kedalaman Retakan Struktur Bangunan Loading Arem, Kayu Putih	PELABUHAN	PT BORNEO MITRA SINERGI

39	Assessment Pada Struktur Bangunan Gedung Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak, Bandung	GEDUNG	PT ADHI KARYA
40	Assessment Gedung PT. Motasa Indonesia, Wonosari	GEDUNG	PT MOTASA INDONESIA
41	Assessment dan Analisis Gedung Graha Permata sakti, Depok	GEDUNG	PT PERMATA HUSADA SAKTI
42	Assessment Struktur Bangunan Gedung Universitas Trisakti, Jakarta	GEDUNG	PT CRP

PENGALAMAN PROYEK TAHUN 2022

NO	PEKERJAAN	JENIS	NAMA KLIEN
1	Asessment Rusun Otorita Bida Sekupang	GEDUNG	INDIVIDU
2	Assessment dan Pengujian bangunan gedung Graha PT BKI	GEDUNG	PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
3	Assessment Uji UPV Retakan Jalan Tol TBPP	JEMBATAN	PT HAJAR ASWAD
4	Assessment Bangunan Gedung Boulevard, Jakarta	GEDUNG	BOULEVARD JAKARTA
5	Structure Analysis Existing Construction Jetty 7A For RDMP Project Pertamina RU V, Balikpapan	GEDUNG	PT SOILENS
6	Pile Intedrity Test Survey For RDMP Project RU V, Balikpapan	GEDUNG	PT SOILENS
7	Assessment Gedung Community Center TMII, Jakarta	GEDUNG	PT ADHI KARYA
8	Assessment Gedung Penunjang SAMSAT, Malimping Banten	GEDUNG	PT PANGKO MEGAH KSO
10	Assessment Gedung Pasar Sentra Industri, Banten	GEDUNG	INDIVIDU
11	Assessment Gedung Bank BJB Syariah, Bandung	GEDUNG	SUCCOFINDO
12	Assessment dan Pengujian Bangunan Dermaga, Jakarta	PELABUHAN	PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
13	Assessment Chemney PT. Kewalram Indonesia, Bandung	GEDUNG	PT KEWALRAM INDONESIA
14	Assessment Bangunan Jembatan Akses Gedung 33 PT BioFarma, Bandung	GEDUNG	PT BIOFARMA
15	Assessment Bangunan Gedung Bale Panyawangan, Jakarta	GEDUNG	PT WIDYADAYA BANDARAN
16	Assessment Bangunan Bank Indonesia Denpasar, Bali	GEDUNG	BANK INDONESIA DENPASAR BALI
17	Assessment Strutur Jembatan Talumolo II, Gorontalo	JEMBATAN	PT WIDYADAYA BANDARAN
18	Assessment Pada Lantai Genset Gedung Biofarma, Bandung	GEDUNG	PT BIOFARMA
19	Assessment Bangunan Gedung Boulevard, Jakarta	GEDUNG	GEDUNG THE BOULVARD
20	Assessment Komponen Struktur Gedung Rumah Sakit Universitas Kristen Indonesia, Jakarta	GEDUNG	PT CIPTA MANDIRI PERENCANA
21	Assessment Struktur Jembatan Kereta Api Lintas Cibatu – Garut	GEDUNG	PT KAI
22	Assessment Komponen Struktur Pintu Air DIR Dadahup Kabupaten Kapuas, Kalimantan	BENDUNG/PEM BANGKIT	PT PP

23	Assessment Struktur Gedung Griya Karya, Semarang	PELABUHAN	PT.KAI
24	Assessment Pemugaran Gedung Pancasila Kementrian Luar Negeri	GEDUNG	GEDUNG PACANSILA KEMENTRIAN LUAR NEGERI
25	Assessment Larutan Penetrant Pada Komponen Struktur Bangunan Hquarters Apartement PT. Pulau Intan, Bandung	GEDUNG	PT PULAUINTAN
26	Assessment Jasa Konsultasi Perencana Pemugaran Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri, Jakarta	GEDUNG	PT. RUANG JELAJAH
27	Assessment Struktur Bangunan Pasar Lingkungan, Jakarta	GEDUNG	PEMERINTAH KOTA TANGERANG
28	Assessment Struktur Bangunan Gedung Rusunawa Sadang Serang, Banten	PELABUHAN	GEDUNG RUSUNAWA SADANG SERANG
29	Assessment Komponen Batuan Jembatan Besuk Kobo'an, Lumajang	GEDUNG	PT ADHI KARYA
30	Assessment Warehouse Obsesiman Jatiluhur, Bandung	JEMBATAN	PT. ALOCITA MANDIRI
31	Assessment Kualitas Beton 3 SPBU, Cirebon	GEDUNG	SPBU CIREBON
32	Assessment Proyek WWTP, Pekanbaru	GEDUNG	PT PP
33	Assessment Pelabuhan Kawawu, Maluku	GEDUNG	PT. SARANA ANTAR NUSA PEREKAYASA
34	Assessment Uji Struktur Box Traffic, Jakarta	GEDUNG	PT.WIJAYA KARYA
35	Assessment Bangunan BFI Banjarmasin	GEDUNG	PT BFI FINANCE INDONESIA
36	Assessment Bangunan Vania Interior Furnishing, Panglima Polim, Jakarta	GEDUNG	PT TAMBARANG ELASTIKA MAS
37	Assessment Jetty Ende, Bali & Gresik	PELABUHAN	PT PRATAMA KRIDA
38	Assessment Struktur Gedung Rumah Sakit Mata, Cicendo	GEDUNG	PT. CIPTA INDAH CITRA
39	Assessment Gedung 3 Second, Pangandaran	GEDUNG	PT. CIPTA INDAH CITRA

PENGALAMAN PROYEK TAHUN 2023

NO	PEKERJAAN	JENIS	NAMA KLIEN
1	Assessment Struktur Ruko Ahmad Yani Bandung	GEDUNG	CV NORISMA MANDIRI
2	Assessment Struktur Rumah Sakit Pena 98, Jakarta	GEDUNG	RS PENA 98
3	Assessment Gedung Bank BJB Kepala Cabang Sukabumi	GEDUNG	PT SUCOFFINDO
4	Assessment Bore Pile Eksisting Bekasi Mansion Apartement	GEDUNG	PT PERUMNAS IIDA GROUP
5	Rebar Scan di Area Proyek Unit 2, Bandung	GEDUNG	PT SANBE FARMA
6	Rebar Scanner Gedung FTMF ITB, Bandung	GEDUNG	ITB
7	Uji Statis dan Dinamis Jembatan Sungai Ramba 12, Palembang	JEMBATAN	PT PERTAMINA
8	Assessment Struktur Bangunan Gedung Hotel Progo, Bandung	GEDUNG	HOTEL PROGO
9	Soil and Structure Assessment Hangar 1 GMF Aeroasia, Jakarta	GEDUNG	PT GMF AEROASIA
10	Assessment Struktur Gedung Kearsipan Bank BJB, Banten	GEDUNG	PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT
11	Assesment Bangunan Gedung Kantor P3D Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur	GEDUNG	JASA KONSULTASI PERORANGAN
12	Assessment Gedung SMP Al Azhar. Bandung	GEDUNG	MANAGEMENT YAYASAN PESANTREN ISLAM AL- AZHAR
13	Assessment Struktur untuk Perkuatan Struktur Gedung Nusantara 1, Jakarta	GEDUNG	PT PASYA
14	Soil Test Akses Pelabuhan Warnasari Kota Cilegon	GEDUNG	PELABUHAN WARNASARI
15	Assessment Kualitas Beton Bangunan Existing Kawasan Industri - Cikarang	GEDUNG	CV BIRO SOMIF
16	Assessment Kualitas Jembatan WAI BINI, Namrole Maluku	JEMBATAN	PT ORMAT
17	Assesment Bangunan Gedung Mini Singapore, Jakarta	GEDUNG	GEDUNG MINI SINGAPORE
18	Hammer Test Daihatsu, Cikarang	GEDUNG	ASTRA DAIHATSU

19	Assessment Permukaan Beton Bangunan Hotel Mercure Nexa, Bandung	GEDUNG	HOTEL MERCURE
20	Assessment Pile Integrity Test Dermaga PLTGU, Semarang	PELABUHAN	PLTGU TAMBAK LOROK
21	Pengujian Kualitas Permukaan Beton Bangunan Gedung RS Immanuel Bandung	GEDUNG	PT CIPTA INDAH CITRA
22	Konsultasi Pekerjaan Penilaian Struktur Atas Gedung Eks Perpustakaan ITB Kampus Jatinangor Sumedang	GEDUNG	ITB JATINANGOR
23	Gedung B2 Rusun PIK 2 Penggalian Cakung Jakarta	GEDUNG	JAYA KONSTRUKSI
24	Pemeriksaan Struktur Pabrik PT Pacinesia Chemical Industry Tangerang Banten	GEDUNG	PT PACINESIA CHEMICAL INDUSTRY
25	Investigasi Struktur Gedung B PPM School Of Management Kota Jakarta	GEDUNG	PT TAMBARANG ELASTIKA MAS
26	Pemeriksaan Sistem Penulangan Beton Menggunakan Alat Profometer Rumah Tinggal, Jakarta	GEDUNG	INDIVIDU
27	Investigasi Struktur Bangunan Rumah Pompa dan Pondasi Trafo PT Krakatau Daya Listrik Cilegon	GEDUNG	PT KRAKATAU KONSULTAN
28	Pemeriksaan dan Pengujian Bangunan Gedung Jiwaseraya	GEDUNG	PT TAMBARANG ELASTIKA MAS
29	Assessment Struktur Bangunan Gedung Astragraphia, Jakarta	GEDUNG	ASTRAGRAPHIA
30	Investigasi Pemeriksaan Konfigurasi Penulangan Struktur Gerdung RS Immanuel Kota Bandung	GEDUNG	PT CIPTA INDAH CITRA
31	Pemeriksaan Kualitas Homogenitas Beton Bangunan Gedung Rumah Sakit Dharmais Jakarta	GEDUNG	RS DHARMAIS
32	Uji Kekerasan Permukaan Beton Gedung Jurusan Keperwatan Potekkes Kemenkes Bandung	GEDUNG	POLTEKES BANDUNG
33	Assessment Struktur Bangunan Gedung Asahimas, Cilegon	GEDUNG	PT. ASAHIMAS CHEMICAL
34	Penelitian Kekutan Struktur Bangunan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Kabupaten Bogor	GEDUNG	PUSDIKLAT BOGOR
35	Investigasi Struktur Trestle Area PLTU PT Cirebon - Jawa Barat	PELABUHAN	PT CIREBON POWER SERVICE
36	Assessment Struktur Jembatan Proyek Sawung Garden Residence, Pamempeuk Garut	JEMBATAN	PT REKA BENTUK RUMAH

37	Investigasi Underpass Cibubur	JEMBATAN	PT SECON DWITUNGGAL PUTRA
38	Pengawasan Millennium Wall Plastering Project	GEDUNG	HOTEL MILLENIUM
39	Pemeriksaan Bangunan Struktur Gedung Pasar RAU, Serang	GEDUNG	PASAR INDUK RAU
40	Pemeriksaan Struktur Gedung Juanda 1 dan Juanda 2 Kementerian Keuangan, Jakarta	GEDUNG	KEMENTERIAN KEUANGAN
41	Pemeriksaan Struktur Gedung PT POS Indonesia, Bandung	GEDUNG	PT POS INDONESIA
42	Investigasi Struktur Bangunan Suku Dinas Kesehatan, Jakarta	GEDUNG	PT WAHAN PRAKARSA UTAMA
43	Hammer Test Gedung Pasar Baru Square, Bandung	GEDUNG	PASAR BARU BANDUNG
44	Investigasi Struktur Area Jogging Track Kawasan SOR Adiwijaya, Tarogong	GEDUNG	JOGGING TRACK TAROGONG
45	Pengujian Pull Off Adhesion Test Jembatan Pelangas dan Jembatan Air Kadur, Bangka Belitung	JEMBATAN	CV. ASTRON MEGA
46	Assessment Struktur Bangunan Gedung Staff 2 Lanud Sulaiman, Bandung	GEDUNG	KEMENTRIAN PU&PR
47	Pengujian Kedalaman Retakan Jalan TOL Purbaleunyi	JEMBATAN	PT. QINAR RAYA MANDIRI
48	Pekerjaan Penyelidikan Daya Dukung Tanah Proyek Pembangunan Indomaret, Garut	GEDUNG	CV NORISMA MANDIRI
49	Investigasi Struktur Bangunan Gedung C Pusat Sumber Sumber Daya Mineral Bara dan Panas Bumi, Bandung	GEDUNG	PSDMBP
50	GPR dan PCL Pemetaan Utilitas dan Pondasi Skytrain Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta, Jakarta	GEDUNG	PT JYABO KONSTRUKSI CAHAYA INDONESIA
51	Uji UPV Struktur Box Pedestrian Box Jalan Tol Ruas, Pekanbaru	JEMBATAN	PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR
52	AuditKelaikan Struktuk Bangunan Dinas Lingkungan Hidup, DKI Jakarta	GEDUNG	PT RAMU PRIMA PERSADA
53	Assessment Struktur Bangunan Gedung Badan Pusat Statistik, Kalimantan Utara	GEDUNG	PT FASADE KOBETAMA INTERNASIONAL
54	Uji Pull Off Adhesion Test Coating, Bandung	GEDUNG	PT ICO TECHNOLOGY
55	Uji Tarik Anchor pada Jembatan Kali Gawe, Semarang	JEMBATAN	PT HUTAMA KARYA

56	Assessment Struktur RAMP Gedung Balai Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kalimantan	GEDUNG	BALAI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)
57	Assessment Struktur Eksiting Gedung Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah IX Jayapura	GEDUNG	BALAI PENGEMBANGAN KONPETENSI WILAYAH IX JAYAPURA
58	Investigasi Struktur Jembatan Kutai Lama, Kalimantan Timur	JEMBATAN	PT PRATAMA DAYA CAHAYA
59	Pekerjaan Kekerasan Permukaan Heton Hotel Grand Palma, Pangandaran	GEDUNG	HOTEL GRAND PALMA PANGANDARAN
60	Pemeriksaan Jumlah dan Ukuran Tulangan Terpasang Jembatan Satu Kota Baru Parahyangan Jawa Barat	JEMBATAN	JEMBATAN SATU KOTA BARU PARAHYANGAN

PENGALAMAN PROYEK TAHUN 2024

NO	PEKERJAAN	JENIS	NAMA KLIEN
1	Pekerjaan Uji Struktur Gd 19 Biofarma, Bandung	GEDUNG	BIOFARMA
2	Pengujian Pull Off Bangunan Gedung Hotel Helios Resto, PIK Jakarta	GEDUNG	PT. TAMBARANG
3	Pengujian Vibrasi Gd. Benyamin Sueb, Jakarta	GEDUNG	INDIVIDU
4	Assessment dan Analisa Kehandalan Struktur Lahan PT Seacon Bintang Sejahtera, Jakarta Utara	JALAN	PT SEACON BINTANG SEJAHTERA
5	Pekerjaan Uji Kualitas Struktur Jalan Tol Pekanbaru - Padang Seksi Bangkinang.	JEMBATAN	INDIVIDU
6	Investigasi Rumah Tinggal di Bojong Koneng, Kab. Bandung	BANGUNAN	INDIVIDU
7	Pengujian UPV Proyek Kantor Kementrian Koordinator 3 Kalimantan Timur	GEDUNG	INDIVIDU
8	Pull Out and Coating Thickness Meter Test for the Pure DC Building - Logos Metrolink Bekasi	GEDUNG	LSI
9	Pengujian Internal & Eksternal Hasil Pekerjaan Proyek BIOFARMA Cikarang.	GEDUNG	PT PP (PERSERO) TBK
10	Uji Kualitas Bangunan Beton Existing, Pulogadung	BANGUNAN	INDIVIDU
11	Survei Bangunan Rumah Bapak Keny, Jakarta Utara	BANGUNAN	INDIVIDU
12	Uji Pull Off Marmer Laminasi PET Foam	SAMPLE	PT ADIGUNA MASONRY INDONESIA
13	Uji Tekan Sampel Beton	SAMPLE	PT ARTA BANGUN JAYA
14	Assessment dan Analisa Kehandan Struktur Bangunan Gedung Japfa Indoland Center Building, Surabaya	GEDUNG	PT JAPFA INDOLAND CENTER
15	Assesment 1 Unit Concrete Vacuum Silencer PT Linde Indonesia, Gresik - Jawa Timur	GEDUNG	PT LINDE INDONESIA
16	Perencanaan Pembangunan Pagar Keliling Kantor Pajak Kalibata, Jakarta	BANGUNAN	KEMENTRIAN KEUANGAN
17	Assessment Gudang Penyimpanan Panyawangan, Bandung	GEDUNG	INDIVIDU
18	Penyelidikan Tanah Bangunan Indomaret, Garut	TANAH	INDIVIDU

19	Uji Core Drill Dan Kuat Tekan Landasan Lanud Atang Sendjaja, Bogor	GEDUNG	INDIVIDU
20	Uji Core Drill Dan Kuat Tekan Landasan Lanud Atang Sendjaja, Bogor	GEDUNG	INDIVIDU
21	Investigasi Bangunan Sekolah Al - Wildan 10, Jakarta	GEDUNG	INDIVIDU
22	Uji Bangunan RSUD Tugu Koja, Jakarta	GEDUNG	RAP & PARTNERS ARCHITECT
23	Konsultan Kajian Keandalan Struktur Bangunan Gedung PT. Universal Agri Bisnisindo (De Heus), Purwodadi	GEDUNG	PT DIAS DESIGN
24	Uji Rebar Scan Ballroom Mall Di Yogyakarta	GEDUNG	PT GARUDA MITRA SEJATI
25	Uji Bangunan Gedung Bea Cukai, Jakarta	GEDUNG	BEA CUKAI
26	Audit Struktur dan Analisa Kehandalan Struktur Bangunan ISBI, Bandung.	GEDUNG	ISBI
27	Uji Homogenitas Bangunan Gedung, Tasikmalaya	GEDUNG	PT GELORA INTAN REKSA
28	Assessment dan Analisa Kehandalan Struktur Ruangan Bawah Kolam Renang (P1) Hotel Gaia, Bandung	GEDUNG	HOTEL GAIA BANDUNG
29	Uji Pull Out Angkur Gegerkalong - Bandung	BANGUNAN	INDIVIDU
30	Pengujian Core Drill Wisma Bakrie, Jakarta	GEDUNG	INDIVIDU
31	Survey Pengujian & Analisis Gudang 5 Lantai, Jakarta Selatan	GEDUNG	INDIVIDU
32	Uji Tekan Sample Kubus Beton	SAMPLE	PT. SARPAT KARUNIA ABADI
33	Assesment 4 Jembatan, Sulawesi	JEMBATAN	INDIVIDU
34	Uji Coating Thickness, Purwakarta	GEDUNG	INDIVIDU
35	Uji Pull Out, Ciawi	BENDUNGAN	PT GUNA ROGATE INDAH
36	Audit Struktur dan Analisa Kehandalan Struktur Gedung SGH di Jalan Proklamasi 46, Menteng, Jakarta Pusat.	GEDUNG	PT SINAR MUTIARA
37	Pengujian Geo Penetrating Radar (GPR) pada Pelabuhan JICT 2 Tanjung Priok, Jakarta.	PELABUHAN	INDIVIDU
38	Elastomeric Rubber Bearing Components	RUBBER	PT TATA INSPEK ORIENTAL

39	Assessment dan Analisa Kehandalan Struktur Bangunan Gedung PT LG Electronics Indonesia	GEDUNG	PT LG ELECTRONICS INDONESIA
40	Pengujian Pull Out Test Padalarang.	TANAH	INDIVIDU
41	Sampel Uji Pull Off Coating	SAMPLE	TAM
42	Pengujian Pabrik Tangerang.	GEDUNG	INDIVIDU
43	Pengujian Pull Out Test Gorontalo	BANGUNAN	PT ARCA ENERGI
44	Uji Tekan Sampel Kubus	SAMPLE	PT GRAHA INDAH PERKASA
45	Uji Geo Penetrating Radar, Medan.	GEDUNG	INDIVIDU
46	Pengujian Rebar Scan dan UPV Test di Museum Bank Indonesia, Jakarta	GEDUNG	INDIVIDU
47	Pengujian Rebar Scan Bangunan Rumah, Depok	BANGUNAN	PT BOGOR SERVICIA INTEGRA
48	Audit Struktur dan Analisa Kehandalan Struktur Mall di Tegal, Jawa Tengah	GEDUNG	INDIVIDU
49	Assessment Pada 3 Titik Pondasi pendukung Balok (Beam) di Batam	BANGUNAN	PT 3S ENGINEERING
50	Pengujian Regangan untuk Re-Elevasi pada Rangka Baja Space Frame Bangunan Gedung Bandara Halim Perdana Kesuma, Jakarta.	GEDUNG	PT AMCK
51	Assessment PT. Indomarco Adi Prima di Kawasan Industri Jababeka 1, Cikarang	GEDUNG	PT INDOMARCO ADI PRIMA
52	Pemeriksaan Komponen Struktur dan Analisa Kehandalan Struktur Rumah Susun Malahayati Lampung	GEDUNG	PUPR
53	Pemeriksaan Komponen Struktur dan Analisa Kehandalan Struktur Rumah Susun Palembang	GEDUNG	PUPR
54	Pemeriksaan Komponen Struktur dan Analisa Kehandalan Struktur Rumah Susun Rancaekek, Bandung	GEDUNG	PUPR
56	Pemeriksaan Komponen Struktur dan Analisa Kehandalan Struktur Rumah Susun Solokan Jeruk, Majalaya	GEDUNG	PUPR
57	Pekerjaan Pengujian Rebar Scanner pada Jetty Merak, Banten	PELABUHAN	PT GEOTIKA KONSULINDO UTAMA

PENGALAMAN PROYEK TAHUN 2025

NO	PEKERJAAN	JENIS	NAMA KLIEN
1	Pekerjaan Analisis Tambahan Atap Gedung “T” PT LGE Indonesia	GEDUNG	PT LGE INDONESIA
2	Pekerjaan Assessment Gedung Bank Sumut KC. Pematang Raya	GEDUNG	BANK SUMUT MEDAN
3	Saksi Tenaga Ahli pada Pekerjaan Assessment Rigid Pavement PT Seacon Bintang Sejahtera	JALAN	PT SEACON BINTANG SEJAHTERA
4	Pekerjaan Audit Stuktur Bangunan Rumah Sakit Pertamina di Jakarta	GEDUNG	PT PANCA LAYAN SEHATI
5	Pekerjaan Loading Test RSUD Jampang Kulon, Sukabumi	GEDUNG	PT BACHTIAR MARPA PRIMA
6	Pekerjaan Pengujian Paving Block	SAMPEL BTON	PT SURYA KARYA BANGUN
7	Pekerjaan Pengujian Core Drill di Plat Lantai Hanggar Husein Sastranegara, Bandung	JALAN	PT SYAPRIL JANIZAR
8	Perkuatan Struktur Kolam Renang Hotel Gaia, Bandung.	GEDUNG	PT GAIA KENCANA
9	Pekerjaan Assessment dan Analisa Ulang Struktur Bangunan Gedung Diagnostic Center RSJ Cisarua Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat	GEDUNG	RSJ CISARUA JAWA BARAT
10	Pekerjaan Assessment Uji GPR Gedung Rumah Sakit Tanjung, Kalimantan Selatan	GEDUNG	INDIVIDU
11	Pekerjaan Struktur Penutupan Void pada Bangunan Wisma Millenia Lantai 9, Jakarta	GEDUNG	PT OMEGA PROPERTINDO
12	Pekerjaan PIT Tiang Pancang, Tangerang	GEDUNG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
13	Pekerjaan Audit Struktur Bangunan Gedung “B” RS Pertamina, Jakarta	GEDUNG	PT ARMASINDO
14	Pengujian Rebar Scanner dan Hammer Test di Bogor	GEDUNG	INDIVIDU
15	Pekerjaan Audit Struktur Ruko Sawangan, Depok	GEDUNG	INDIVIDU
16	Pekerjaan Uji UPV pada Lahan Pembangunan Gedung di Daan Mogot, Jakarta	GEDUNG	PT HARMONI BANGUN SEJAHTERA

17	Pekerjaan Uji Rebar Scanner pada Bangunan Rumah Sakit di Jakarta Selatan (RS AU Tahap 1)	GEDUNG	PT PUTRA KARYA SALIMINDO
18	Pekerjaan Assessment Bangunan Hotel Apartement Urban Heights, Tangerang	GEDUNG	PT SEKOLAH CIKAL
19	Pekerjaan Geolistrik Batam	LAHAN	INDIVIDU
20	Tenaga Ahli pada Pekerjaan Assessment Bangunan Ditjen, Jakarta	GEDUNG	DITJEN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
21	Pekerjaan Uji Rebar Scanner pada Bangunan Rumah Sakit di Jakarta Selatan Tahap 2 (RS AU Tahap 2)	GEDUNG	PT PUTRA KARYA SALIMINDO
22	Pekerjaan Audit Struktur Bangunan Kantor Direktorat Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta (Kemenkumham)	GEDUNG	PT SELARAS
23	Pekerjaan Assessment Struktur Bangunan Gudang PT Gumindo Perkasa Industri, Serang	GEDUNG	PT GUMINDO PERKASA INDONEISA
24	Pekerjaan Audit Stuktur Bangunan Polikim, Depok	GEDUNG	PT GANESHA PRATAMA CONSULTANT
25	Pekerjaan Uji Geo Penetrating Radar pada Jalan Tol Balaraja, Banten	JALAN	PT NUSA RAYA CIPTA, TBK
26	Assessment dan Analisa Kehandalan Struktur Warehouse PT Dino Custom Mixing	GEDUNG	PT DINO CUSTOM MIXING
27	Pekerjaan Uji Core Drill Basement Hotel Pullman, Bandung	GEDUNG	PT TRITUNGGAL LESTARI MAKMUR
28	Pekerjaan Uji Pull Out Test Shotcrete, Manado	LAHAN	PT BISETTA
29	Pekerjaan Uji Tekan Sampel Beton Kubus di Laboratorium	SAMPEL BETON	PT NOXUS XAR CONSTRUCTION
30	Pekerjaan Uji Tekan Sampel Beton Kubus di Laboratorium	SAMPEL BETON	INDIVIDU
31	Pekerjaan Uji UPV Homogenitas Bangunan Gedung di Banjarmasin	GEDUNG	POLITEKNIK NEGERI BANJARMASIN
32	Pekerjaan Assessment Bangunan di Pekanbaru	GEDUNG	PT BUMI ASIA PERMATA
33	Pekerjaan Uji Tarik dan Lengkung Baja Tulangan 2 Sampel di Laboratorium.	SAMPEL BAJA	PT ADHI KARYA

33	Pekerjaan Uji Rebar Scanner pada Bangunan Plaza di Bogor	GEDUNG	INDIVIDU
34	Pekerjaan Uji Tekan 3 Sampel Beton Kubus di Laboratorium	SAMPEL BETON	SEKOLAH DAARUT TAUHID INDONESIA
35	Pekerjaan Uji Tarik & Lengkung 5 Sampel Baja Tulangan dI Laboratorium	SAMPEL BAJA	PT SPE (SURYA PERDANA ELEKTRIKA)
36	Pekerjaan Uji Tekan 5 Sampel Beton Silinder di Laboratorium	SAMPEL BETON	PT KA PROPERTI MANAJEMEN
37	Pekerjaan Perbaikan Retakan dan Kelembapan Hotel Gaia, Bandung	GEDUNG	PT GAIA KENCANA
38	Pekerjaan Assessment dan Analisa Kehandalan Struktur Bangunan PT Kimia Farma Plant Banjaran, Bandung	GEDUNG	PT KIMIA FARMA
39	Pekerjaan Uji Rapid Chloride Penetration Test (RCPT) 2 Beton Silinder	SAMPEL BETON	PT ADHI KARYA (PERSERO)
40	Pekerjaan Uji PDA & PIT pada Area PT PGE Kamojang, Kabupaten Garut	LAHAN	PT SURYA BUDI UTAMA
41	Pekerjaan Uji UPV Homogenitas Proyek Penambahan Lantai 5 & 6 Rumah Sakit Hermina, Tasikmalaya	GEDUNG	PT GELORA INTA REKSA
42	Pemeriksaan Kelembapan Struktur PT. Japfa Indoland Centre Surabaya Sebelum Perkuatan Struktur Pada Lokasi Tower-1 Dan Tower-2	GEDUNG	PTCONCRETE TECHNOLOGY INDONESIA
43	Pekerjaan Assessment Struktur Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), Jakarta Pusat	JEMBATAN	PU
44	Pekerjaan Assessment dan Analisa Keandalan Struktur Garasi Mobil Auto Wise PIK 2, Jakarta	GEDUNG	PT POIN SEJAHTERA LAND
45	Pekerjaan Klorida dan Karbonasi Cagar Budaya, Bogor	GEDUNG	INDIVIDU
46	Pekerjaan Uji Tarik & Lengkung 4 Sampel Baja Tulangan Diameter 10 mm dan 13 mm di Laboratorium	SAMPEL BAJA	PT ADHI KARYA (PERSERO)
47	Pekerjaan Pengujian Pull Off dan Uji Kelembapan Universitas Andalas, Padang	GEDUNG	PPK PEMBANGUNAN KAMPUS UNIVERSITAS ANDALAS
48	PekerjaanAssessment dan Analisa Keandalan Struktur Bangunan Rusun, Cengkareng	GEDUNG	PTSUGITEX
49	Pekerjaan Uji UPV Kedalaman Retakan Beton Jalan Tol Cipularang KM 67 dan Jembatan Cisomang	GEDUNG	PT QINAR RAYA MANDIRI

50	Pekerjaan Assessment Bangunan Gedung di Cirebon	GEDUNG	INDIVIDU
51	Pekerjaan Uji Tekan 3 Sampel Beton Silinder Diameter 15cm di Laboratorium	GEDUNG	INDIVIDU
52	Pengadaan Elastomeric Rubber Bearing Components, Tegal	ELASTOMERIC RUBBER BEARING	PT WAHANA GULA INVESTAMA
53	Pengadaan Elastomeric Rubber Bearing Components, Jambi.	ELASTOMERIC RUBBER BEARING	CV RAYYAN
54	Pekerjaan Assessment PT Rotating Offshore Solutions Batu Ampar, Batam	GEDUNG	PT ROTATING OFFSHORE SOLUTIONS
55	Pekerjaan Pengukuran Verticality dan Levelling Ruko 9 Unit PIK 2, Jakarta	GEDUNG	PT POIN SEJAHTERA LAND
56	Pekerjaan Assessment dan Analisa Keandalan Struktur Sekolah Rakyak 1R Sarmi, Papua	GEDUNG	SATUAN KERJA PRASARANA STRATEGIS PAPUA
57	Pekerjaan Assessment Struktur Disnaker Jawa Barat, Bandung	GEDUNG	INDIVIDU
58	Pekerjaan Assessment JPO Pasar Senin Pasca Perbaikan, Jakarta	JEMBATAN	PT ADHIKARYA PERSERO
59	Pekerjaan Assessment dan Analisa Keandalan Struktur Kantor 4 Lantai (Termasuk Lantai Atap Dak) Lantai, Jakarta	GEDUNG	PT DISAIN PUTRA PERSADA
60	Pekerjaan Pengujian Laju Korosi Baja Tulangan dengan Alat Canin Meter, Palembang.	JEMBATAN	INDIVIDU
61	Pekerjaan Assessment dan Analisa Keandalan Struktur Bangunan Singapore Intercultural School, Bandung.	GEDUNG	SIS GROUP OF SCHOOLS
62	Pekerjaan Pemeriksaan Korosi Baja Profil Bangunan Ganesha Indonesia EPCM, Cileungsi	GEDUNG	GANESHA INDONESIA EPCM

KANTOR PUSAT

Jl. Gegerkalong Hilir No. 175
Kel. Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung - 40151

WORKSHOP

Jl. Cijerokaso No. 92 / Jl. Sarikaso No. 11 A
Kel. Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung - 40151



SCAN ME

binanusa_id
PT Binanusa Pracetak & Rekayasa
corporate@binanusa.co.id
0813 1313 3252
022 2003252